



SALINAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan, perlu merumuskan kembali tujuan, sasaran, program, dan strategi yang disusun dalam Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya mewujudkan Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019, perlu menyempurnakan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 84 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 156 Tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2015-2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Seluruh pimpinan unit organisasi eselon I, II, dan unit pelayanan teknis di lingkungan Perpustakaan Nasional wajib menyusun dan menyesuaikan rencana strategis sesuai dengan Keputusan ini.

KETIGA : Rencana strategis unit organisasi eselon I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi eselon I paling lama 1 (satu) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan dan disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

KEEMPAT : Rencana strategis unit organisasi eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi eselon II paling lama 2 (dua) minggu setelah rencana strategis unit organisasi eselon I ditetapkan dan disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional dan pimpinan unit organisasi eselon I.

KELIMA : Rencana strategis unit pelayanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan keputusan pimpinan organisasi unit pelayanan teknis paling lama 2 (dua) minggu setelah rencana strategis unit organisasi eselon I ditetapkan dan disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional dan pimpinan unit organisasi eselon I.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 84 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 156 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA, 





MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN 2015-2019

**RENCANA STRATEGIS
PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2015-2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas: *(i)* melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; *(ii)* memajukan kesejahteraan umum; *(iii)* mencerdaskan kehidupan bangsa; dan *(iv)* ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia serta mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia khususnya yang berbentuk dokumen karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam lainnya, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan wahana belajar sepanjang hayat. Melalui keberadaan perpustakaan terjadi transformasi pengetahuan sehingga terwujud manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter dalam berkebudayaan Indonesia.

Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan. Dalam mengemban tugas, Perpusnas memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia (perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus), perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan di Indonesia. Sebelum terbit Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas telah mendapat amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Undang-Undang ini mengamanatkan Perpusnas untuk mengelola kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam. Pengelolaan ini bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai tugas tersebut, Perpusnas berfungsi sebagai repositori khazanah pengetahuan dan kebudayaan Indonesia. Selain itu, Perpusnas dalam fungsinya sebagai perpustakaan pelestarian karya anak bangsa tidak hanya melestarikan karya cetak karya rekam tetapi juga melestarikan pemikiran/ide/gagasan pendiri bangsa Indonesia (*founding fathers*) tokoh Proklamator dengan membentuk kelembagaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukit Tinggi. Hal tersebut dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme kedua tokoh proklamator untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter dalam budaya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada Pasal 5 ayat (5) menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Saat ini telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Sisdiknas. Program ini menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan budi pekerti dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab anak terhadap dirinya sendiri, lingkungan, maupun keluarga. Salah satu program wajib dari pendidikan budi pekerti adalah membentuk kebiasaan siswa membaca buku. Hal tersebut dilaksanakan dengan mewajibkan siswa membaca pada 15 menit pertama sebelum hari pembelajaran dimulai.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan salah satu wujud kehidupan berbangsa yang demokratis. Dalam hal ini perpustakaan memiliki peran sangat penting sebagai penyedia dan pengelola informasi berbasis bahan perpustakaan. Sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development Goals*) masyarakat dunia, perpustakaan ikut serta dalam peningkatan akses terhadap informasi dan pengetahuan secara universal, yang merupakan pilar penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Hal ini tertuang dalam *Lyon Declaration* hasil konferensi *International Federation Library Association and Institution (IFLA)* tahun 2014.

Sejumlah data mengungkapkan bahwa saat ini tingkat literasi masyarakat Indonesia yang dilaksanakan oleh *Central Connecticut State University (CCSU)* mendapat peringkat 60 dari 61 negara, sementara itu berdasarkan pemeringkatan *Programme for International Student Assessment (PISA)* yang dilakukan tiap tiga tahun sekali oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) tahun 2016 Indonesia menempati peringkat 69 dari 76 negara dengan skor membaca di bawah rata-rata 396 dengan kecenderungan meningkat 2,3 poin per-tahun. Bila dibandingkan posisi pada tahun 2012 berdasar nilai median, capaian membaca siswa Indonesia meningkat dari 337 poin di tahun 2012 menjadi 350 poin di tahun 2015. Nilai matematika melonjak 17 poin dari 318 poin di tahun 2012, menjadi 335 poin di tahun 2015. Lonjakan tertinggi terlihat pada capaian sains yang mengalami kenaikan dari 327 poin di tahun 2012 menjadi 359 poin di tahun 2016. Peningkatan capaian *median* yang lebih tinggi dari *mean* ini merupakan indikator yang baik dari sisi peningkatan akses dan pemerataan kualitas secara inklusif. Sementara itu berdasarkan kajian Perpustakaan tahun 2015 mengenai minat baca masyarakat Indonesia memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai minat baca yang belum optimal dengan skala nilai 25,3.

Upaya peningkatan budaya baca masyarakat perlu dilakukan secara struktur, masif, terpadu dan komprehensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Dimensi budaya baca pada masyarakat dapat dilihat dari beberapa variabel, antara lain: (1) rasio buku dengan jumlah penduduk; (2) fasilitas perpustakaan dan taman bacaan; (3) penerbit, penulis dan toko buku; (4) akses internet, digitalisasi perpustakaan berbasis *web*; (5)

distribusi (memperkecil kesenjangan antarwilayah); (6) daya beli masyarakat; dan (7) lingkungan yang kondusif.

Namun di balik semua keteringgalan tersebut, Indonesia mempunyai peluang besar untuk bersaing dengan negara-negara maju. *World Economic Forum (WEF)* melalui *World Competitive Index (WCI)* yang dilakukan tahun 2016, menempatkan Indonesia pada urutan ke-41 dari 138 negara dengan kecenderungan meningkat. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70%, sisanya, 30% penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun). Bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2020-2030 ini, akan membuka banyak peluang dan perkembangan lebih baik. Pada tahun 2020-2030 tersebut, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 60 juta jiwa, atau 10 orang usia produktif hanya menanggung 3-4 orang usia tidak produktif, sehingga akan terjadi peningkatan investasi masyarakat dan investasi nasional. Pada sisi lain, survei pemeringkatan literasi yang dilaksanakan oleh CCSU tahun 2012 sebenarnya juga memberikan apresiasi positif, khususnya pada indikator pembangunan perpustakaan. Indonesia memperoleh peringkat 36 dalam pembangunan perpustakaan dari 61 negara. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan China yang berada di peringkat 61. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah perpustakaan di Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra) Perpustnas Tahun 2010-2014 mempunyai fokus pengembangan perpustakaan di Indonesia yaitu dengan program pengembangan berbagai jenis perpustakaan.

Tabel 1. Capaian Renstra 2010-2014

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH PERPUSTAKAAN
1	Perpustakaan Nasional	1
2	Perpustakaan Umum	23.611
	a. Perpustakaan Umum Provinsi	33
	b. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	467
	c. Perpustakaan Umum Kecamatan	600
	d. Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan	21.467
	e. Perpustakaan Komunitas	693
	f. Taman Bacaan	351

3	Perpustakaan Khusus	7.132
4	Perpustakaan Sekolah/Madrasah	121.187
	a. SD/MI	100
	b. SMP/MTs	12
	c. SMA/SMK/MA	6.599
	d. Pondok Pesantren	2.588
5	Perpustakaan Pendidikan Tinggi	2.428
	JUMLAH	154.359

Namun demikian belum semua program tuntas dilaksanakan, antara lain program peningkatan jumlah tenaga perpustakaan, program ekstensifikasi layanan perpustakaan serta program pengembangan koleksi. Selain program tersebut, terkait dengan fungsi manajerial seperti pengawasan dan pengendalian serta organisasi tata laksana masih perlu dioptimalkan. Renstra tahun 2015-2019 menjamin keberlanjutan Renstra 2010-2014.

1.2 Kondisi Umum

1.2.1 Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 5 Undang-Undang ini menjelaskan:

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas pada pasal 7, ayat 1, butir c, menjelaskan bahwa pemerintah

berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. Selaras dengan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat 2 butir q menyatakan bahwa perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan pada semua level pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan desa.

Berdasarkan data pada Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca (P3MB), Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional tahun 2016, perbandingan ketersediaan perpustakaan dibandingkan dengan kebutuhan perpustakaan berdasarkan jumlah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, lembaga pemerintah/swasta, pendidikan dasar, menengah dan tinggi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Ketersediaan Dibandingkan Kebutuhan Perpustakaan Sesuai dengan Wilayah, Lembaga dan Satuan Pendidikan

N O	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH KETERSEDIAA N	JUMLAH KEBUTUHA N	TINGKAT KETERSEDIAA N %
1	Perpustakaan Nasional	1	1	100
2	Perpustakaan Umum	23.611	91.191	26
	a. Perpustakaan Umum Provinsi	33	34	97
	b. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	467	515	91
	c. Perpustakaan Umum Kecamatan	600	7.094	8
	d. Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan	21.467	82.505	26
	e. Perpustakaan Komunitas	693	693	100
	f. Taman Bacaan	351	351	100
3	Perpustakaan Khusus	7.132	384.633	2
4	Perpustakaan Sekolah/Madrasah	121.187	287.631	42
	a. SD/MI	100.000	174.179	57
	b. SMP/MTs	12.000	56.62	21
	c. SMA/SMK/MA	6.599	35.581	19
	d. Pondok Pesantren	2.588	21.251	12
5	Perpustakaan Pendidikan Tinggi	2.428	4.496	54
	JUMLAH	154.359	767.951	20

Sumber: Pusat pengembangan Perpustakaan dan Kajian Minat Baca

Perpustakaan Nasional, 2016

Dalam Tabel 2, yang dimaksud dengan perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan organisasi. Berdasarkan data Tabel 2 menunjukkan bahwa disparitas ketersediaan perpustakaan dibandingkan

jumlah kebutuhan adanya perpustakaan masih sangat tinggi, utamanya ketersediaan perpustakaan khusus (baru tersedia 2%), perpustakaan umum kecamatan (baru tersedia 8%), dan pondok pesantren (hanya terdapat 12%). Secara umum keberadaan semua jenis perpustakaan di Indonesia baru mencapai 20% dari kebutuhan yang harus ada. Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan keberadaan lima jenis perpustakaan yang ada di Indonesia, secara peringkat ketercukupannya sebagai berikut: (1) perpustakaan nasional 100%; (2) pendidikan tinggi 54%; (3) perpustakaan sekolah 42%; (4) perpustakaan umum 26%; dan (5) perpustakaan khusus 2%.

Sebaran ketersediaan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapat layanan perpustakaan. Sebaran ketersediaan perpustakaan di provinsi berdasarkan jenis perpustakaan yaitu perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan pendidikan tinggi di Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rasio Jumlah Perpustakaan dan Penduduk per-Provinsi

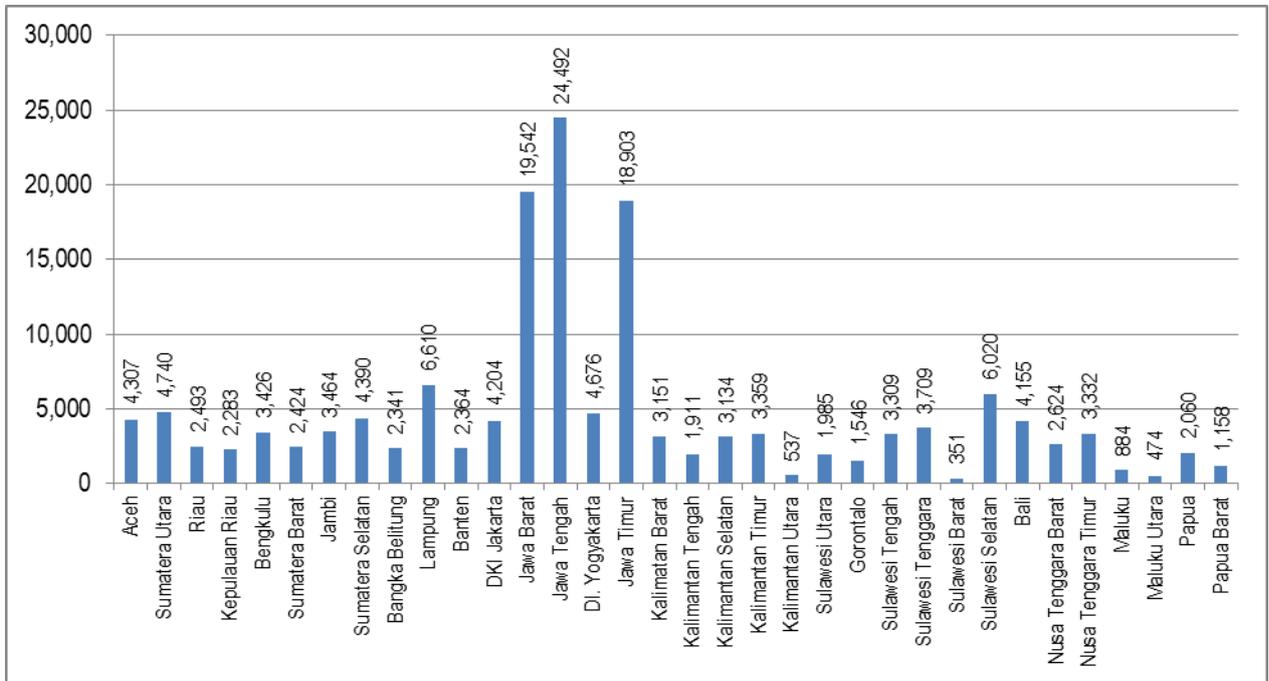
NO	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK	Perpustakaan					Rasio	
			PU	PK	PS	PPT	Jumlah	Perp./pend.	
	Sumatera	55,272,900	8,384	952	26,713	429	36,478	1,515	
1	Aceh	5,002,000	1,763	239	2,257	48	4,307	1,161	
2	Sumatera Utara	13,937,800	905	45	3,677	113	4,740	2,940	
3	Riau	6,344,400	522	33	1,882	56	2,493	2,545	
4	Kepulauan Riau	1,973,000	128	61	2,080	14	2,283	864	
5	Bengkulu	1,874,900	429	239	2,728	30	3,426	547	
6	Sumatera Barat	5,196,300	344	17	2,027	36	2,424	2,144	
7	Jambi	3,402,100	1,719	11	1,716	18	3,464	982	
8	Sumatera Selatan	8,052,300	1,710	28	2,610	42	4,390	1,834	
9	Bangka Belitung	1,372,800	115	6	2,208	12	2,341	586	
10	Lampung	8,117,300	749	273	5,528	60	6,610	1,228	
	Jawa	145,143,600	5,881	3,621	63,245	1,434	74,181	1,957	
11	Banten	11,955,200	445	22	1,820	77	2,364	5,057	
12	DKI Jakarta	10,177,900	82	818	3,022	282	4,204	2,421	
13	Jawa Barat	46,709,600	445	1,268	17,589	240	19,542	2,390	
14	Jawa Tengah	33,774,100	2,382	278	21,564	268	24,492	1,379	
15	DI. Yogyakarta	3,679,200	135	367	3,982	192	4,676	787	
16	Jawa Timur	38,847,600	2,392	868	15,268	375	18,903	2,055	
	Kalimantan	15,342,900	2,038	1,202	8,674	178	12,092	1,269	
17	Kalimantan Barat	4,789,600	298	206	2,615	32	3,151	1,520	
18	Kalimantan Tengah	2,495,000	565	145	1,174	27	1,911	1,306	
19	Kalimantan	3,989,800	588	256	2,215	75	3,134	1,273	

NO	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK	Perpustakaan					Rasio	
			PU	PK	PS	PPT	Jumlah	Perp./pend.	
	Selatan								
20	Kalimantan Timur	3,426,600	140	595	2,580	44	3,359	1,020	
21	Kalimantan Utara	641,900	447	-	90	-	537	1,195	
	Sulawesi	18,724,000	3,009	679	13,023	209	16,920	1,107	
22	Sulawesi Utara	2,412,100	525	72	1,363	25	1,985	1,215	
23	Gorontalo	1,133,200	211	-	1,317	18	1,546	733	
24	Sulawesi Tengah	2,876,700	573	228	2,484	24	3,309	869	
25	Sulawesi Tenggara	2,499,500	637	239	2,815	18	3,709	674	
26	Sulawesi Barat	1,282,200	188	6	152	5	351	3,653	
27	Sulawesi Selatan	8,520,300	875	134	4,892	119	6,020	1,415	
	Bali dan Nusa Tenggara	14,108,500	1,478	544	7,967	122	10,111	1,395	
28	Bali	4,152,800	204	156	3,759	36	4,155	999	
29	Nusa Tenggara Barat	4,835,600	328	250	1,998	48	2,624	1,843	
30	Nusa Tenggara Timur	5,120,100	946	138	2,210	38	3,332	1,537	
	Maluku	2,848,800	694	56	583	25	1,358	2,098	
31	Maluku	1,686,500	355	56	454	19	884	1,908	
32	Maluku Utara	1,162,300	339	-	129	6	474	2,452	
	Papua	4,020,900	2,127	78	982	31	3,218	1,250	
33	Papua	3,149,400	1,589	78	369	24	2,060	1,529	
34	Papua Barat	871,500	538	-	613	7	1,158	753	
	Total	255,461,700	23,611	7,132	121,187	2,428	154,358	1,655	

Keterangan: PS : Perpustakaan Sekolah. PPT : Perpustakaan Perguruan Tinggi, PK : Perpustakaan Khusus, PN : Perpustakaan Nasional, PS : Perpustakaan Sekolah, PU : Perpustakaan Umum

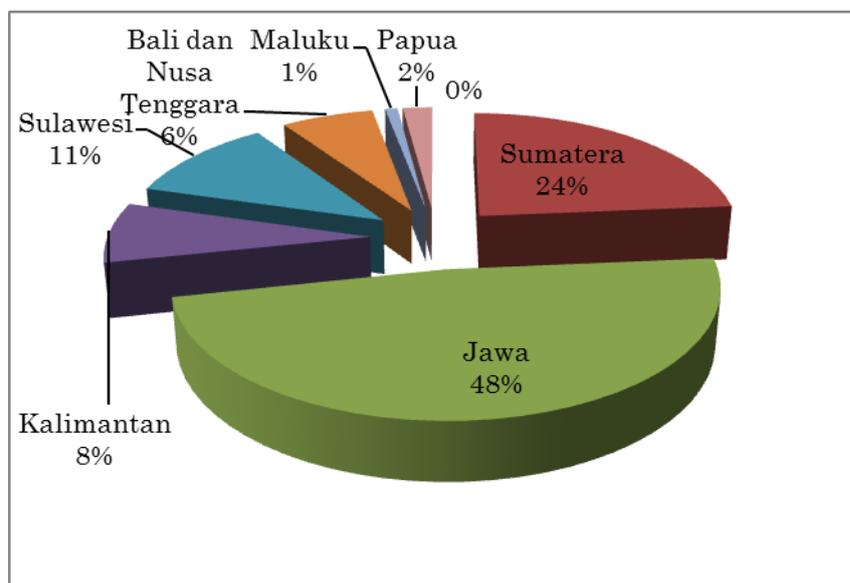
(Sumber: Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Perpustakaan Nasional tahun 2016 dan BPS, 2016.)

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara umum rasio perbandingan antara jumlah keberadaan perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk per-provinsi rata-rata kurang mencukupi dan mampu dilayani. Perbandingan jumlah sebaran ketersediaan perpustakaan di masing-masing provinsi secara jelas dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 1. Sebaran Ketersediaan Perpustakaan Per-Provinsi

Berdasarkan Grafik 1, nampak bahwa sebaran ketersediaan perpustakaan paling banyak provinsi Jawa Tengah, kedua Jawa Barat dan ketiga Jawa Timur. Sedangkan sebaran perpustakaan paling sedikit Sulawesi Barat, kedua Maluku Utara dan ketiga di provinsi baru, yakni Kalimantan Utara.



Grafik 2. Peringkat Sebaran Perpustakaan Per Wilayah

Sementara itu berdasarkan Grafik 2 menunjukkan bahwa peringkat sebaran jumlah perpustakaan berbasis kewilayahan dapat disajikan, sebagai berikut:

- (1) Jawa sebesar 74.181 (48%);
- (2) Sumatera sebesar 36.478 (24%);
- (3) Sulawesi sebesar 16.920 (11%);
- (4) Kalimantan sebesar 12.092 (8%);

- (5) Bali dan Nusa Tenggara sebesar 10.111 (6%);
- (6) Papua sebesar 3.218 (2%);
- (7) Maluku sebesar 1.358 (1%).

Data sebaran perpustakaan berbasis kewilayahan menunjukkan bahwa wilayah barat Indonesia yaitu Jawa dan Sumatera menempati posisi tertinggi sebaran perpustakaan. Sementara itu, semakin ke wilayah timur Indonesia sebaran perpustakaan semakin kecil. Data ini menjelaskan bahwa fokus pembinaan dan pengembangan perpustakaan di masa mendatang perlu dilakukan perubahan orientasi yaitu dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan terutama pada kawasan timur Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada pasal 9 ayat 1 s.d. 3 menyatakan bahwa setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional. Untuk itu, ketentuan dalam SNP juga menjadi indikator dalam penilaian akreditasi perpustakaan. Komponen penilaian akreditasi penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan terdiri atas; (i) layanan; (ii) kerjasama; (iii) koleksi; (iv) pengorganisasian bahan perpustakaan; (v) sumber daya manusia; (vi) gedung atau ruangan; (vii) anggaran; dan (viii) manajemen perpustakaan. Dari jumlah perpustakaan sebanyak 154.359 perpustakaan yang tersebar di 34 provinsi baru 0,3% terakreditasi atau sesuai dengan standarisasi nasional. Artinya 99,7% keberadaan perpustakaan belum terakreditasi. Secara terinci hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Perpustakaan Terakreditasi

NO	JENIS	JUMLAH PERPUSTAKAAN	NILAI AKREDITASI			TERAKREDITASI	%
			A	B	C		
1	Perpustakaan Umum	23,611	13	38	33	84	0,4
2	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2,428	40	49	31	120	5,0
3	Perpustakaan Sekolah	121,187	26	69	85	180	0,1
4	Perpustakaan Khusus	7,132	1	18	27	46	0,6
	JUMLAH	154,358	80	174	176	430	0,3

Sumber: Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Perpustakaan Nasional, 2016

Data Tabel 4, terlihat bahwa perpustakaan perguruan tinggi memiliki jumlah terbanyak untuk perpustakaan dengan akreditasi A. Dengan demikian, *role model* pembinaan perpustakaan dapat mengacu pada perpustakaan perguruan tinggi. Dari analisis data Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Nasional dalam menjalankan fungsi sebagai

perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan, memerlukan strategi percepatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dengan berfokus pada jenis perpustakaan sekolah (terbesar jumlahnya) dan berbasis kewilayahan (wilayah Indonesia bagian timur), dengan mencermati pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah kerja sama pemangku kepentingan perpustakaan, khususnya pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perpustakaan.

1.2.2. Koleksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Pasal 3 menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan. Terkait dengan kepentingan pengembangan koleksi perpustakaan, pasal tersebut menegaskan kepentingan pengembangan koleksi bahan perpustakaan lingkup nasional, deposit karya cetak dan karya rekam, pelestarian dan penelitian bahan perpustakaan, termasuk naskah Nusantara sebagai warisan dokumenter bangsa. Dalam hubungan ini Perpustakaan bertanggung jawab dalam beberapa hal berikut.

1. Mengembangkan koleksi nasional untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
2. Mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
3. Melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca;
4. Menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih-suara ke tulisan (transkripsi), dan alih-media (transmedia);
5. Mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno nusantara yang berada di luar negeri; dan
6. Melakukan inventarisasi dan pendaftaran naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat dan lembaga, serta memberikan penghargaan bagi masyarakat yang merawat, memelihara dan melestarikan naskah kuno nusantara.

Salah satu peran Perpustakaan yang amat penting dalam mengembangkan koleksi nasional dan melestarikan hasil budaya bangsa adalah kegiatan pengelolaan deposit terbitan nasional dalam rangka menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan koleksi nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Pengaturan dan mekanisme mengenai Serah-Simpan karya cetak dan karya rekam selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai kewajiban Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam terhadap penerbit, pengusaha rekaman, warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri, orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia untuk menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekamnya kepada Perpustakaan dan/atau Perpustakaan Daerah, atau Badan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab Perpustakaan dalam mengembangkan koleksi nasional dan melestarikan hasil budaya bangsa, salah satu jenis bahan perpustakaan ialah naskah nusantara. Naskah nusantara adalah warisan dokumenter bangsa yang bersifat unik, karena ditulis tangan dengan menggunakan media, aksara dan bahasa tradisional atau daerah. Naskah nusantara termasuk dalam benda cagar budaya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, naskah masuk dalam lingkup aspek Pelindungan (Pasal 56 s.d. Pasal 77), aspek Pengembangan (Pasal 78 s.d. Pasal 84), aspek Pemanfaatan (Pasal 85 s.d. 94), serta aspek Pengawasan dan Penyidikan (Pasal 99 dan Pasal 100).

1.2.2.1 Ketersediaan Koleksi Bahan Perpustakaan Dibanding dengan Pengguna Perpustakaan

Salah satu komponen penting perpustakaan adalah ketersediaan koleksi bahan perpustakaan. Tanpa adanya koleksi bahan perpustakaan secara memadai dalam hal jumlah dan kualitas, perpustakaan tidak akan mampu memberikan layanan yang baik bagi penggunaannya. Koleksi bahan perpustakaan atau sumber informasi merupakan salah satu kekuatan dan daya tarik utama bagi pengguna untuk datang memanfaatkan perpustakaan.

Berdasarkan data koleksi perpustakaan Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca (P3MB), Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional, tahun 2016, ketersediaan koleksi bahan perpustakaan dibanding jumlah pengguna perpustakaan yang dilayani, tampak sebagai berikut.

Tabel 5. Perbandingan Ketersediaan Koleksi Bahan Perpustakaan Terhadap Pengguna Perpustakaan

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah	Koleksi	Pemustaka Potensial	Rasio Koleksi
1	Perpustakaan Nasional	1	2.652.336	255,461,700	1.04%
2	Perpustakaan Umum Provinsi	33	9.617.429	255,461,700	3.76%
3	Perpustakaan Umum Kab/Kota	467	66.479.479	255,461,700	26.02 %
4	Perpustakaan Umum Kecamatan	600	600.000	255,461,700	0.23%
5	Perpustakaan Desa/Kelurahan	21.467	21.467.000	255,461,700	8.40%
6	Perpustakaan Komunitas	1044	522.000	255,461,700	0.20%
7	Perpustakaan Khusus	7.132	7.132.000	186,100,917	3.83%
8	SD/MI	100.000	10.000.000	32,463,300	30.80 %
9	SMP/MTS	12.000	6.000.000	14,148,093	42.41 %
10	SMA/SMK/MA	6.599	3.299.500	10,430,180	31.63 %
11	Pondok Pesantren	2.588	258.800	3,650,000	7.09%
12	Perguruan Tinggi	2.428	2.428.000	6,787,805	35.77 %
	JUMLAH	154.359	130.456.544		

Sumber : Pusat pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Perpustakaan Nasional, 2016 dan Badan Pusat Statistik, 2016

Berdasarkan data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah koleksi bahan perpustakaan pada semua jenis perpustakaan di Indonesia sampai dengan tahun 2015 adalah 130.456.544 eksemplar. Jumlah bahan perpustakaan tersebut tersebar di sejumlah 154.359 perpustakaan. Data tersebut jika diperbandingkan menunjukkan bahwa rata-rata satu perpustakaan di Indonesia memiliki 845,15 eksemplar koleksi. Rasio ketercukupan koleksi dengan menggunakan data pada Tabel. 5, menunjukkan bahwa jika standar rasio yang digunakan sebesar 100%, maka jumlah rasio ketercukupan koleksi pada masing-masing jenis perpustakaan masih di bawah standar rasio koleksi yang dibutuhkan, yaitu satu koleksi untuk satu penduduk/pemustaka.

1.2.2.2 Rasio Ideal Koleksi Bahan Perpustakaan Tersedia di Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang terbuka layanannya untuk semua tingkat usia, kalangan sosial, jenis kelamin, ras, agama dan komunitas berbeda di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini semua informasi dalam bentuk karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya pasal 11 yaitu Standar Nasional Perpustakaan dengan salah satunya adalah standar koleksi perpustakaan. Berdasarkan survei yang dilakukan tahun 2016 oleh Perpustakaan Nasional diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan Koleksi Perpustakaan Umum dengan Standar Nasional Perpustakaan

No.	Provinsi	Jml Pend.	Jml Koleksi	Koleksi Ideal	Ket.	Kurang Koleksi
1	Aceh	5,002,000	1,360,921	75,030	Ya	-
2	Sumatera Utara	13,937,800	2,416,108	209,067	Ya	-
3	Riau	6,344,400	688,798	95,166	Ya	-
4	Kepulauan Riau	1,973,000	702,593	29,595	Ya	-
5	Bengkulu	1,874,900	781,804	28,124	Ya	-
6	Sumatera Barat	5,196,300	1,679,056	77,945	Ya	-
7	Jambi	3,402,100	725,936	51,032	Ya	-
8	Sumatera Selatan	8,052,300	2,483,881	120,785	Ya	-
9	Bangka Belitung	1,372,800	699,242	20,592	Ya	-
10	Lampung	8,117,300	1,321,988	121,760	Ya	-
11	Banten	11,955,200	1,810,592	179,328	Ya	-
12	DKI Jakarta	10,177,900	748,090	152,669	Ya	-
13	Jawa Barat	46,709,600	7,257,761	700,644	Ya	-
14	Jawa Tengah	33,774,100	13,186,604	506,612	Ya	-
15	DI Yogyakarta	3,679,200	3,783,581	55,188	Ya	-
16	Jawa Timur	38,847,600	13,359,485	582,714	Ya	-
17	Kalimantan Barat	4,789,600	1,123,528	71,844	Ya	-
18	Kalimantan Tengah	2,495,000	787,449	37,425	Ya	-
19	Kalimantan Selatan	3,989,800	1,850,645	59,847	Ya	-
20	Kalimantan Timur	3,426,600	1,220,836	51,399	Ya	-
21	Kalimantan Utara	641,900	221,788	9,629	Ya	-
22	Sulawesi Utara	2,412,100	298,867	36,182	Ya	-
23	Gorontalo	1,133,200	733,149	16,998	Ya	-
24	Sulawesi Tengah	2,876,700	1,541,569	43,151	Ya	-
25	Sulawesi Tenggara	2,499,500	1,279,313	37,493	Ya	-

No.	Provinsi	Jml Pend.	Jml Koleksi	Koleksi Ideal	Ket.	Kurang Koleksi
26	Sulawesi Barat	1,282,200	64,170	19,233	Ya	-
27	Sulawesi Selatan	8,520,300	4,577,246	127,805	Ya	-
28	Bali	4,152,800	3,753,132	62,292	Ya	-
29	Nusa Tenggara Barat	4,835,600	931,371	72,534	Ya	-
30	Nusa Tenggara Timur	5,120,100	2,434,233	76,802	Ya	-
31	Maluku	1,686,500	326,279	25,298	Ya	-
32	Maluku Utara	1,162,300	1,167,423	17,435	Ya	-
33	Papua	3,149,400	344,241	47,241	Ya	-
34	Papua Barat	871,500	435,229	13,073	Ya	-
Jumlah		255,461,700	76,096,908	3,831,924	Ya	-

Jika dilihat berdasarkan tabel 6, terlihat bahwa koleksi perpustakaan umum di Indonesia terlihat bahwa semua perpustakaan umum di Indonesia telah memiliki koleksi yang cukup dan sesuai standar yaitu 0.015/kapita. Namun jika pengembangan koleksi bahan perpustakaan umum menggunakan pendekatan standar koleksi perpustakaan menurut IFLA/UNESCO. Standar rasio ketersediaan jumlah koleksi bahan perpustakaan terhadap jumlah pengguna atau populasi yang dilayani sebesar 200%. Menggunakan penghitungan rasio ini maka jumlah ketercukupan koleksi pada perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia nampak masih jauh dari ideal. Secara rinci hal ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 7. Rasio Ideal Ketersediaan Koleksi Bahan Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengguna Perpustakaan Umum Menurut IFLA/UNESCO

No	Provinsi	Jml Pend	Jml Kol.	Kol. Ideal	Sesuai standar	Kurang Kol.
1	Aceh	5,002,000	1,360,921	10,004,000	Tidak	8,643,079
2	Sumatera Utara	13,937,800	2,416,108	27,875,600	Tidak	25,459,492
3	Riau	6,344,400	688,798	12,688,800	Tidak	12,000,002
4	Kepulauan Riau	1,973,000	702,593	3,946,000	Tidak	3,243,407
5	Bengkulu	1,874,900	781,804	3,749,800	Tidak	2,967,996
6	Sumatera Barat	5,196,300	1,679,056	10,392,600	Tidak	8,713,544
7	Jambi	3,402,100	725,936	6,804,200	Tidak	6,078,264
8	Sumatera Selatan	8,052,300	2,483,881	16,104,600	Tidak	13,620,719
9	Bangka Belitung	1,372,800	699,242	2,745,600	Tidak	2,046,358
10	Lampung	8,117,300	1,321,988	16,234,600	Tidak	14,912,612
11	Banten	11,955,200	1,810,592	23,910,400	Tidak	22,099,808
12	DKI Jakarta	10,177,900	748,090	20,355,800	Tidak	19,607,710
13	Jawa Barat	46,709,600	7,257,761	93,419,200	Tidak	86,161,439

14	Jawa Tengah	33,774,100	13,186,604	67,548,200	Tidak	54,361,596
15	DI Yogyakarta	3,679,200	3,783,581	7,358,400	Tidak	3,574,819
16	Jawa Timur	38,847,600	13,359,485	77,695,200	Tidak	64,335,715
17	Kalimantan Barat	4,789,600	1,123,528	9,579,200	Tidak	8,455,672
18	Kalimantan Tengah	2,495,000	787,449	4,990,000	Tidak	4,202,551
19	Kalimantan Selatan	3,989,800	1,850,645	7,979,600	Tidak	6,128,955
20	Kalimantan Timur	3,426,600	1,220,836	6,853,200	Tidak	5,632,364
21	Kalimantan Utara	641,900	221,788	1,283,800	Tidak	1,062,012
22	Sulawesi Utara	2,412,100	298,867	4,824,200	Tidak	4,525,333
23	Gorontalo	1,133,200	733,149	2,266,400	Tidak	1,533,251
24	Sulawesi Tengah	2,876,700	1,541,569	5,753,400	Tidak	4,211,831
25	Sulawesi Tenggara	2,499,500	1,279,313	4,999,000	Tidak	3,719,687
26	Sulawesi Barat	1,282,200	64,170	2,564,400	Tidak	2,500,230
27	Sulawesi Selatan	8,520,300	4,577,246	17,040,600	Tidak	12,463,354
28	Bali	4,152,800	3,753,132	8,305,600	Tidak	4,552,468
29	Nusa Tenggara Barat	4,835,600	931,371	9,671,200	Tidak	8,739,829
30	Nusa Tenggara Timur	5,120,100	2,434,233	10,240,200	Tidak	7,805,967
31	Maluku	1,686,500	326,279	3,373,000	Tidak	3,046,721
32	Maluku Utara	1,162,300	1,167,423	2,324,600	Tidak	1,157,177
33	Papua	3,149,400	344,241	6,298,800	Tidak	5,954,559
34	Papua Barat	871,500	435,229	1,743,000	Tidak	1,307,771
Jumlah		255,461,700	76,096,908	510,923,200	Tidak	434,826,292

Sumber: Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Perpusnas, 2016.

Tabel 7 merepresentasikan semua perpustakaan umum di Indonesia tidak memiliki rasio ketercukupan koleksi secara ideal. Standar rasio ketercukupan koleksi yang ideal di perpustakaan umum menurut IFLA/UNESCO adalah 2:1 atau setiap dua koleksi untuk satu penduduk. Berdasarkan perhitungan rasio ketercukupan koleksi yang ideal menurut standar IFLA/UNESCO menunjukkan bahwa terjadi kekurangan koleksi sebesar 434,826,292 eksemplar pada perpustakaan umum di Indonesia. Jumlah koleksi yang saat ini tersedia di perpustakaan umum di Indonesia rata-rata masih jauh dari yang diharapkan, yaitu sebesar 18%. Kekurangan koleksi yang sangat besar pada perpustakaan umum adalah masalah yang sangat serius karena keterbatasan akses pada sumber ilmu pengetahuan, dapat berdampak buruk pada perkembangan tingkat literasi informasi pada hampir seluruh wilayah Indonesia.

1.2.2.3 Koleksi Naskah Nusantara Sebagai Warisan Dokumenter Bangsa

Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai kelompok etnis atau suku bangsa. Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia memiliki 633 suku bangsa (BPS-ISEAS, 2013). Pada masa lalu, kelompok-kelompok etnis yang hidup di Nusantara tersebut merekam berbagai informasi yang berkaitan dengan peradaban mereka dengan cara menuliskannya. kelompok etnis tersebut menuliskan dengan menggunakan aksara, bahasa, dan media yang beraneka-ragam. Melintasi perjalanan waktu, sebagian dari tulisan-tulisan tersebut dapat bertahan hingga generasi saat ini, salah satu wujudnya berupa naskah atau manuskrip.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan (pasal 1 ayat 4). Sayangnya, masyarakat Indonesia banyak yang tidak mengenal naskah nusantara adalah tradisi tulis dari masa lampau. Kekurangtahuan masyarakat terhadap naskah nusantara disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: (1) Keterbatasan akses, karena teks asli berupa tulisan tangan tersimpan dalam jumlah yang sangat terbatas dan tempat penyimpanannya tidak selalu dapat dengan mudah diakses oleh kebanyakan orang; (2) Keterbatasan jumlah ahli akibat keterbatasan peluang untuk mengenal atau mempelajarinya; (3) Sebagian orang berpendapat bahwa pelestarian nilai-nilai lama dapat menjadi penghalang bagi modernisasi. dan (4) Keterbatasan penguasaan bahasa karena banyak naskah kuno nusantara yang ditulis dalam bahasa dan aksara yang berbeda.

Sebagai sumber sejarah, naskah Nusantara memberi sumbangan yang cukup besar bagi sejarah kebudayaan bangsa Indonesia. Paradigma dalam memandang sejarah menuntut kita untuk tidak cukup hanya “belajar sejarah”, tetapi bagaimana kita “belajar dari sejarah”. Sesungguhnya, dalam banyak kasus, kearifan lokal yang terkandung dalam teks naskah-naskah kuno tersebut dapat menjadi alternatif solusi yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di masa kini, seperti masalah agama, pangan dan pertanian, *gender*, kesehatan, hukum, arsitektur dan permukiman, dan lain-lain. Kearifan lokal yang terkandung dalam naskah Nusantara juga dapat menuntun masyarakat Indonesia untuk bersikap toleran dan menghargai keberagaman, memiliki etika dan

sopan santun, memiliki etos kerja dan jiwa kepemimpinan, mengutamakan gotong-royong yang sesuai dengan karakter bangsa. Pada gilirannya, melalui pengkajian, pemaknaan, dan pengaktualisasian nilai-nilai yang terkandung dalam naskah Nusantara, kita menjadi bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat, sehingga dapat berdiri tegak dalam pergaulan peradaban di dunia.

Faktanya, tidak semua negara memiliki peninggalan tertulis dari masa lalu. Sebagai negara yang penduduknya terdiri atas berbagai kelompok etnis, Indonesia termasuk salah satu negara yang terkaya di dunia dalam hal warisan naskah, baik dari segi jumlah maupun keragaman bahasa dan aksara. Naskah-naskah ini bukan hanya tersimpan di berbagai lembaga penyimpanan di dalam negeri tetapi juga tersebar di lembaga penyimpanan naskah di luar negeri. Berdasarkan penelusuran melalui katalog yang tersedia, dapat diketahui bahwa jumlah naskah Nusantara seluruhnya yang telah terdaftar adalah 58.947 eksemplar, 33.519 eksemplar berada di dalam negeri dan sisanya 25.428 naskah berada di luar negeri. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut.

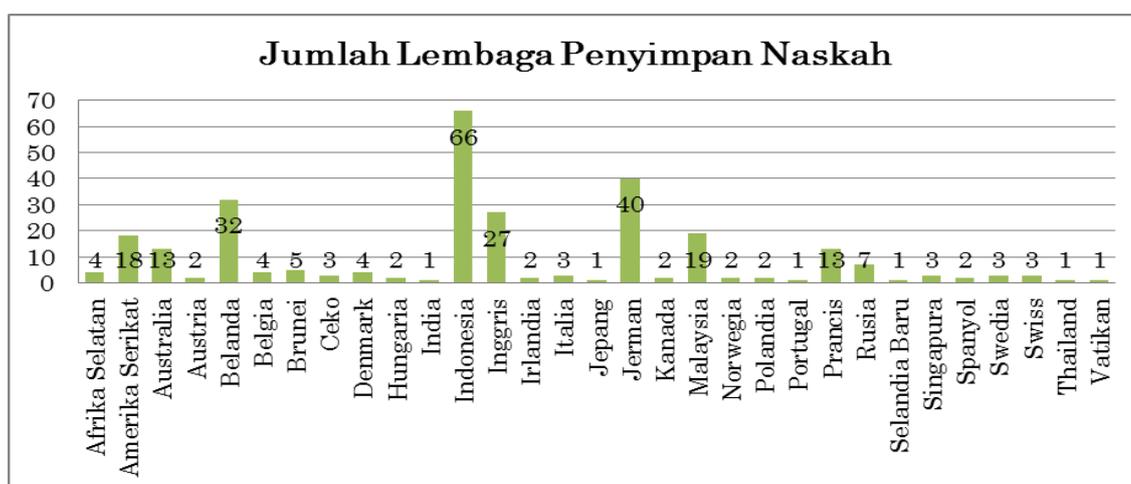
Tabel 8 Sebaran Naskah Nusantara di Seluruh Dunia

No	Negara	Jumlah Naskah	Persentase
1	Indonesia	33.519	58.070
2	Belanda	17.397	29.740
3	Malaysia	3.000	5.128
4	Inggris	1.388	2.373
5	Jerman	1.350	2.308
6	AmerikaSerikat	743	1.270
7	Prancis	349	0.597
8	Brunei	216	0.369
9	Australia	113	0.193
10	Denmark	62	0.106
11	Singapura	57	0.097
12	Afrika Selatan	55	0.094
13	Irlandia	55	0.094
14	Rusia	46	0.079
15	Italia	35	0.060
16	Thailand	28	0.048
17	Belgia	25	0.043
18	Austria	15	0.026
19	Vatikan	10	0.017
20	Ceko	6	0.010
21	Hungaria	6	0.010
22	Kanada	5	0.009
23	Polandia	5	0.009
24	Norwegia	3	0.005

No	Negara	Jumlah Naskah	Persentase
25	Swedia	3	0.005
26	Swiss	3	0.005
27	Portugal	2	0.003
28	Spanyol	1	0.002
	JUMLAH	58.947	100

SUMBER: Chambert-Loir & Oman Fathurahman, 1999, *Khazanah Naskah; Panduan Koleksi Naskah-naskah Indonesia Sedunia*; Endangered Archive Programs British Library untuk kawasan Indonesia (2008-2016) dalam <http://eap.bl.uk/>

Berdasarkan tabel 8, Indonesia tetap menjadi negara yang paling banyak memiliki naskah Nusantara, disusul Belanda, Malaysia, Inggris, Jerman dan Perancis dengan jumlah yang cukup signifikan. Naskah-naskah tersebut disimpan di lembaga penyimpanan naskah berupa museum, perpustakaan dan arsip. Jika dihitung jumlah lembaga yang menyimpan naskah sebanyak 287 lembaga. Di Indonesia terdapat 66 lembaga, sementara 221 lembaga lainnya terdapat di luar negeri.



Grafik 3. Jumlah Lembaga/negara Penyimpan Naskah

Sumber: Chambert-Loir & Oman Fathurahman, 1999, *Khazanah Naskah; Panduan Koleksi Naskah-naskah Indonesia Sedunia*

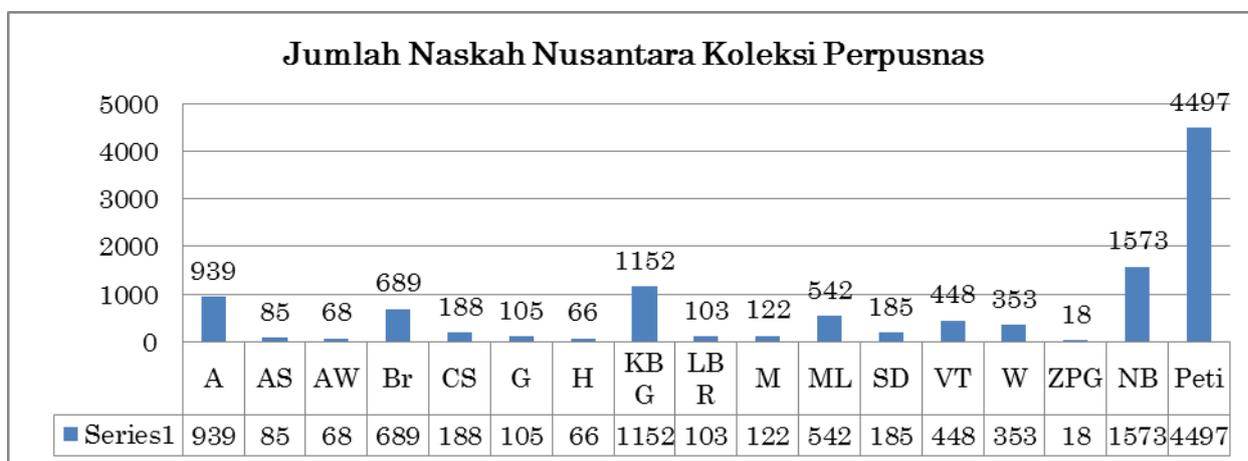
Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang memiliki naskah dan tradisi tulis. Di antaranya ialah Aceh, Batak, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kerinci, Palembang, Lampung, Banten, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Lombok, Bima, Tenggara, Banjarmasin, Sulawesi Selatan, Buton, Wolio dan Ternate. Bahasa Asing seperti Arab dan Belanda juga termasuk ke dalam khazanah pernaskahan nusantara. Jenis-jenis naskah berdasarkan bahasanya diklasifikasikan dalam Tabel 9 berikut.

Tabel 9 Sebaran Naskah Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Berdasarkan Bahasa

No	Jenis Naskah	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
1	Aceh	967	543	1510
2	Arab	2291	2102	4393
3	Bali	3891	1831	5722
4	Batak	737	2151	2888
5	Belanda	457	39	496
6	Bugis/Makasar/Mandar	5406	713	6119
7	Jawa/Jawa Kuna	11789	8058	19847
8	Madura	163	273	436
9	Melayu	5463	8898	14361
10	Sunda/Sunda Kuna	1676	668	2344
11	Ternate	55	7	62
12	Wolio	72	0	72
13	Indonesia Timur	388	4	392
14	Kalimantan	11	13	24
15	Sumatra Selatan	153	128	281
	JUMLAH	33519	25428	58947

SUMBER: Chambert-Loir & Oman Fathurahman, 1999, *Khazanah Naskah; Panduan Koleksi Naskah-naskah Indonesia Sedunia*; Endangered Archive Programs British Library untuk kawasan Indonesia (2008-2016) dalam <http://eap.bl.uk/>

Perpusnas merupakan lembaga terdepan di Indonesia yang mengoleksi naskah Nusantara, dengan jumlah koleksi 11.133 eksemplar yang tersebar dalam berbagai sub-koleksi atau klasifikasi yang menunjukkan keragaman dari segi asal-usul koleksi. Sebaran koleksi naskah Perpusnas berdasarkan subkoleksi atau klasifikasi adalah sebagai berikut.



Grafik 4. Grafik Jumlah Koleksi Naskah Nusantara Perpusnas dan Persebarannya dalam Sub Koleksi

Sumber: Layanan Koleksi Khusus, Perpusnas, 2016

Naskah Nusantara ditulis pada berbagai media. Media yang digunakan untuk menulis bervariasi seperti bambu, kayu, kulit kayu,

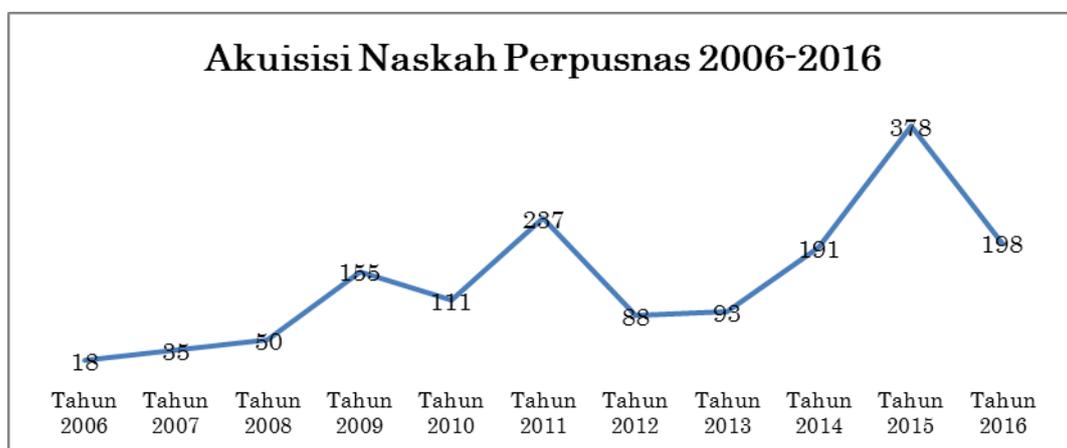
nipah, lontar, atau kertas sesuai dengan ketersediaan media di tempat yang menghasilkan tradisi tulis tersebut. Naskah Batak dan Sumatera Selatan banyak ditulis di bambu dan kayu, naskah Bali ditulis di daun lontar, sedangkan naskah Jawa, Melayu, dan Sunda sebagian besar ditulis di kertas. Di sebagian besar daerah, menulis naskah tidak lagi menjadi bagian tradisi yang hidup, tetapi di sebagian daerah lain, seperti Bali dan Lombok, masyarakat masih menulis naskah. Berikut ini data naskah nusantara koleksi Perpusnas berdasarkan jenis media pada Tabel 10.

Tabel 10 Naskah Nusantara Koleksi Perpusnas Berdasarkan Media Tulis

Jenis Bahan	Jumlah	%
Daluwang	384	3.45
Kertas Eropa	6963	62.54
Kertas Polos	298	2.68
Kulit Kayu	136	1.22
Bambu	69	0.62
Daun Palem	1579	14.18
Kertas Bergaris	1146	10.29
Belum Teridentifikasi	558	5.01
Total	11133	100

Sumber: Daftar Aset Perpustakaan Nasional RI, Oktober 2016

Perpusnas sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian sebagaimana amanat Undang-Undang, maka dimensi pengelolaan naskah Nusantara juga mencakup empat aspek, yaitu (1) akuisisi (sekaligus deposit), (2) pelestarian, dan (3) penelitian dan (4) publikasi. Berdasarkan Tabel 8 jumlah naskah dan persebarannya di berbagai negara, perlu dicatat bahwa beberapa negara aktif dalam kegiatan akuisisi naskah kuno. Berbeda dengan koleksi naskah di Eropa, koleksi naskah Nusantara yang berada di Malaysia dan Brunei terus-menerus bertambah secara signifikan, seiring kebijakan akuisisi naskah yang gencar dilakukan termasuk naskah dari wilayah Republik Indonesia. Di Indonesia, Perpusnas merupakan lembaga yang paling banyak melakukan kegiatan akuisisi naskah. Hingga tahun 2016, telah diakuisisi sebanyak 1.554 naskah baru, baik berdasarkan pembelian maupun hibah. Dinamika pengembangan koleksi naskah nusantara Perpusnas dalam satu dasawarsa nampak dalam Grafik 5 berikut.



Grafik 5. Akuisisi Naskah Perpustakaan Tahun 2006-2016

Sumber: Pusat Pengembangan Akuisisi Naskah Perpustakaan RI 2006-2016

Kegiatan pelestarian bahan perpustakaan sama pentingnya dengan kegiatan-kegiatan lainnya di perpustakaan seperti kegiatan akuisisi, katalogisasi, layanan informasi. Tujuan dari pelestarian yaitu mengusahakan agar naskah Nusantara tersedia dalam keadaan baik, siap pakai dan lestari selama-lamanya untuk penggunaan dalam jangka panjang. Ada tiga komponen utama dalam pengelolaan pelestarian, yaitu:

1. Survei kondisi fisik naskah Nusantara dan fasilitas perpustakaan: untuk mengetahui seberapa besar kerusakan dan fasilitas yang diperlukan untuk pelestarian.
2. Kebijakan pelestarian, merupakan dokumen yang dapat dijadikan pedoman untuk menyusun program pelestarian
3. Perencanaan pelestarian merupakan program prioritas untuk menangani pelestarian naskah Nusantara.

Naskah kuno mengandung berbagai informasi penting yang harus diungkap dan disampaikan kepada masyarakat. Tetapi, naskah-naskah kuno yang ada di Nusantara biasanya ditulis dalam aksara non-Latin dan bahasa daerah. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri dalam memahami naskah. Salah satu cara untuk mengungkap dan menyampaikan informasi yang terkandung di dalam naskah kepada masyarakat adalah melalui penelitian filologi. Saat ini penelitian naskah kuno masih sangat minim. Hingga tahun 2000, tercatat hanya berhasil dilaksanakan 1.103 penelitian naskah Nusantara sebagaimana nampak pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Penelitian Naskah Kuno Nusantara Tahun 2000

No	Jenis Naskah	Jumlah
1	Aceh	61
2	Banjar	7
3	Batak	12
4	Bugis	81
5	Gorontalo	2

No	Jenis Naskah	Jumlah
6	Jawa	247
7	Melayu	303
8	Minang	83
9	Sasak	15
10	Sunda	292
	Jumlah	1103

Sumber, Ekadjati (2000). *Direktori Edisi Naskah Nusantara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

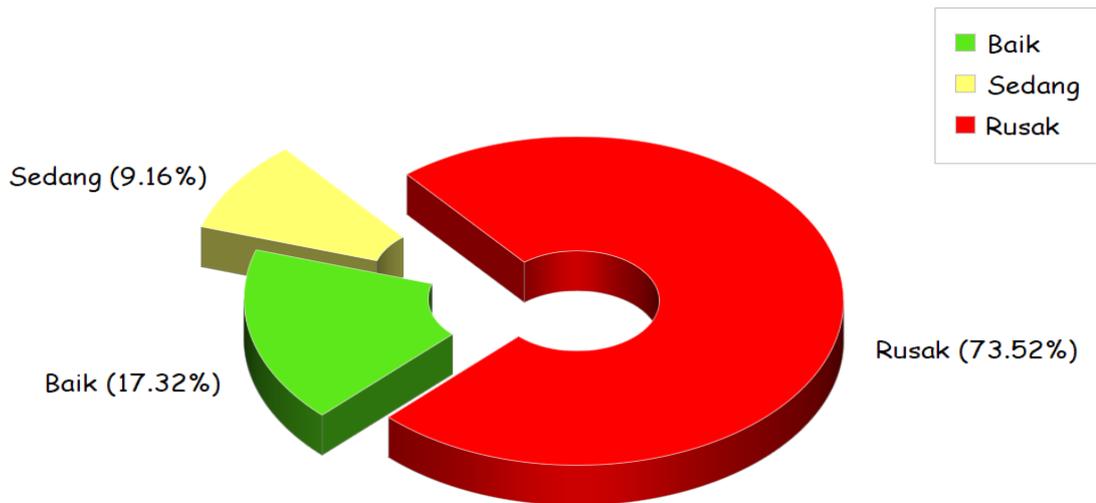
Setelah tahun 2001, penelitian terus berkembang. Berdasarkan data dari *Thesaurus of Southeast Asian Manuscripts* (2016), tercatat ada 996 penelitian naskah Nusantara tambahan sejak tahun 2001-2016 (62 penelitian/tahun) sehingga total penelitian berjumlah 3.202 penelitian. Berdasarkan data ini, maka rasio jumlah penelitian naskah Nusantara adalah sebesar 5,43 %. Berkaitan dengan koleksi Perpustakaan Nasional, jumlah penelitian filologi yang telah dihasilkan sejak tahun 1993 dan diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional berjumlah 106 judul. Dengan asumsi bahwa satu judul berdasarkan pada kajian satu naskah, maka rasio penelitian naskah terhadap koleksi naskah Perpustakaan Nasional adalah 0,01%. Sementara itu rasio kontribusi penelitian yang dilakukan Perpustakaan Nasional terhadap jumlah total penelitian naskah adalah 3,31%. Sejak tahun 2012 penelitian naskah (alih aksara dan terjemahan) berjumlah rata-rata 7 (tujuh) penelitian per-tahun. Angka penelitian dan publikasi ini masih sangat jauh dari jumlah naskah yang ada dalam koleksi Perpustakaan Nasional.

1.2.2.1. Pelestarian Koleksi Warisan Dokumenter Bangsa

Kegiatan pelestarian (preservasi) bahan perpustakaan adalah hal yang memiliki tingkat urgensi tinggi dari sebuah perpustakaan. Hal tersebut dikarenakan objeknya adalah koleksi dan akses pada perpustakaan. Seiring dengan perkembangan teknologi, ledakan informasi dan cara pengelolaan yang lebih efisien, preservasi mengalami transformasi tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip dasar tentang memperpanjang umur, menentukan pilihan, kualitas, integritas dan akses melainkan lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan pemakai dan memberi peran sosial kepada masyarakat.

Peran serta Perpustakaan Nasional dalam melestarikan warisan budaya bangsa dalam bentuk analog maupun nilai informasinya terhitung paling besar hasilnya dibandingkan lembaga pelestarian yang lain di Indonesia namun masih terhitung kecil jumlahnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil

kajian terhadap resiko kerusakan koleksi layanan dan deposit menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara hasil preservasi dengan beban koleksi yang membutuhkan penanganan preservasi. Hasil kajian risiko menunjukkan Grafik 6 sebagai berikut.



Grafik 6. Persentase Kerusakan Koleksi Perpustakaan Nasional
(sumber: Kajian Pusat Preservasi, Perpustakaan Nasional RI Tahun 2013)

Dari total 435.514 eksemplar jumlah koleksi yang ada pada bagian layanan, sebanyak 20% *cluster sampling* menunjukkan bahwa 73,52% (387.514 eksemplar) kondisi koleksi layanan Perpustakaan Nasional berada dalam kondisi **rusak**. Tingkat keasaman yang tinggi dan kerusakan kimia berupa *foxing, tanned*, jamur, *korosi tinta* dan *tears* adalah penyebab terbesar kerusakan pada koleksi. Kerusakan kerapuhan pada koleksi adalah jenis kerusakan tertinggi terjadi karena akumulasi berbagai proses degradasi material yang menjadi satu sehingga tingkat kerusakan ini seharusnya dihindari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang salah satu tugasnya menjalankan fungsi pelestarian khazanah budaya bidang perpustakaan. Dalam menjalankan misinya Pusat Preservasi Bahan Pustaka telah melakukan pelestarian konservasi dan restorasi analog 26.000 eksemplar, reprografi 24.000 lembar dan alihmedia digital 13.760 eksemplar setiap tahunnya. Dengan melihat betapa besar jumlah kerusakan studi kasus terhadap koleksi dengan kerapuhan (hasil pemetaan) maka pusat preservasi membutuhkan waktu untuk program alihmedia selama 28 tahun. Begitu pula halnya dengan program restorasi maka hanya akan tercapai pada di atas 20 tahun. Untuk dapat mengejar kurun waktu yang cukup panjang maka pelestarian

membutuhkan strategi yang tepat dan bersifat masal dengan cakupan yang luas.

Selain melaksanakan pelestarian bahan perpustakaan yang menjadi koleksi sendiri, Perpustakaan juga melakukan pelestarian pada koleksi di seluruh Indonesia baik yang dimiliki oleh pemerintah lokal maupun pribadi. Salah satunya prioritas kegiatannya adalah pelestarian naskah kuno daerah. Sebaran kegiatan pelestarian naskah nusantara di berbagai daerah yang dilakukan oleh Perpustakaan dalam kurun waktu hampir 10 tahun nampak dalam tabel berikut.

Tabel 12. Pelestarian Naskah Nusantara oleh Perpustakaan Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Daerah	Jumlah Naskah (Judul)	Jumlah Naskah
2011	3 daerah	300	Sulawesi Selatan, NTB, DIY
2012	3 daerah	300	Sumatera Barat, Maluku Utara, Jambi
2013	2 daerah	200	Maluku, Jawa Tengah
	3 daerah	548	Bali, Jawa Barat, Sumatera Utara
2015	4 daerah	1200	Jawa Barat, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan
2016	2 daerah	400	Riau, Sumatera Barat
	TOTAL	2.948	14 Provinsi

Sumber: Pusat Preservasi Bahan Pustaka, Perpustakaan, 2016

Berdasarkan Tabel 12, maka rasio pelestarian naskah terhadap jumlah naskah di dalam negeri hanya 8,79 % dari total koleksi dalam negeri, sementara rasio pelestarian naskah terhadap jumlah naskah seluruhnya adalah 5,00%. Jumlah ini pun baru menjangkau 14 provinsi atau belum menjangkau 20 provinsi di Indonesia lainnya. Jika dihitung rata-rata capaian pelestarian naskah per-tahun berdasarkan tabel di atas, yakni 491,33 naskah per-tahun, maka akan dibutuhkan waktu 62 tahun untuk melakukan pelestarian naskah nusantara di dalam negeri.

Karakteristik naskah itu sendiri adalah jenis koleksi yang tingkat kerapuhannya tinggi, terjadi korosi tinta, sangat asam, termakan serangga dan jarang sekali ditemukan dalam kondisi utuh. Dengan karakter tersebut maka pelestariannya pun membutuhkan perhatian khusus mendesak agar bentuk warisan budaya tersebut tidak hilang atau punah.

Selain Perpustakaan sebagai lembaga pelestari bahan perpustakaan terbesar di Indonesia, sebenarnya terdapat juga institusi pelestarian seperti museum dan arsip di bawah kementerian atau lembaga untuk melaksanakan fungsi yang sama.

Tabel 13. Institusi Pelestari di Indonesia

No.	Institusi Pelestarian	Jumlah (Satuan kerja)	Keterangan (Persebaran Wilayah)
1.	Perpustakaan Nasional RI	1	DKI Jakarta
2.	Balai Pelestari Cagar Budaya	13	Aceh, Sumatra Barat, Jambi, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Maluku Utara
3.	Museum	262	Nasional, provinsi, dan khusus
4.	Arsip Nasional RI	1	DKI Jakarta
5.	Badan atau Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	34	Provinsi
6.	Galeri Nasional	1	DKI Jakarta
7.	Balai Konservasi DKI	1	DKI Jakarta
8.	Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI)	1	DKI Jakarta
Jumlah		314 Institusi	

Sumber: Pusat Preservasi bahan Pustaka, 2016.

Dalam bidang pelestarian sejumlah 314 institusi yang terdata pada Tabel 13 juga melakukan kegiatan konservasi, restorasi, dan alihmedia terhadap warisan budaya berwujud maupun tidak berwujud dalam bentuk analog maupun nilai informasi.

1.2.3 Tenaga Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pasal 29 menyatakan bahwa tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan

kepuustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan memiliki kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Dalam pengelolaan perpustakaan, pustakawan dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan. Adapun tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pasal 25 menyatakan bahwa pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan, dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa Perpusnas sebagai instansi pembina jabatan fungsional pustakawan mempunyai tugas berikut.

1. Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional pustakawan;
2. Mengusulkan tunjangan dan batas usia pensiun;
3. Mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional pustakawan;
4. Memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional pustakawan;
5. Melakukan pembinaan tim penilai jabatan fungsional pustakawan;
6. Melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pustakawan dan ketentuan teknis;
7. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi pustakawan;
8. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik pustakawan;
9. Memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi pustakawan dan tempat uji kompetensi;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional pustakawan.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah dinyatakan bahwa kualifikasi tenaga perpustakaan setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1.000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah.

Perpustakaan dapat diselenggarakan secara optimal apabila tersedia jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan yang cukup. Jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan sangat menentukan keberhasilan layanan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, dengan melihat profil tenaga perpustakaan dan koleksi bahan perpustakaan pada sebuah perpustakaan sekolah, dapat dijadikan tolok ukur pencapaian akademik murid di sekolah tersebut. Umumnya, sekolah yang memiliki tenaga perpustakaan dan koleksi bahan perpustakaan yang baik pada perpustakaan sekolahnya, siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut mampu mencapai nilai lebih tinggi dari standar ujian nasional, dibanding sekolah lain, dengan kondisi tenaga dan koleksi perpustakaannya kurang mencukupi.

Kualitas tenaga perpustakaan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepuasan pemustaka. Kualitas tenaga perpustakaan dilihat dari kompetensi dan profesionalisme. Kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan dapat ditingkatkan dengan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta melalui evaluasi kualitas tenaga perpustakaan melalui uji kompetensi dan asesmen sertifikasi. Sebaran jumlah tenaga perpustakaan di seluruh provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Sebaran Tenaga Perpustakaan Berdasarkan Jenis Perpustakaan Per-Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan					Jumlah
		PS	PPT	PK	PN	PU	
1	Aceh	0	52	1	0	27	80
2	Sumatera Utara	2	47	4	0	48	101
3	Riau	7	29	3	0	41	80
4	Kepulauan Riau	0	0	0	0	3	3
5	Bengkulu	0	27	1	0	13	41
6	Sumatera Barat	5	89	5	0	14	113

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan					Jumlah
		PS	PPT	PK	PN	PU	
7	Jambi	5	18	7	0	30	60
8	Sumatera Selatan	11	21	7	0	35	74
9	Bangka Belitung	0	0	0	0	14	14
10	Lampung	37	25	1	0	12	75
11	Banten	2	36	10	0	9	57
12	DKI Jakarta	0	94	203	253	21	571
13	Jawa Barat	3	97	88	0	49	237
14	Jawa Tengah	19	168	11	0	86	284
15	DI.Yogyakarta	3	139	15	0	44	201
16	Jawa Timur	2	158	10	0	68	238
17	Kalimantan Barat	1	21	2	0	8	32
18	Kalimantan Tengah	0	12	0	0	27	39
19	Kalimantan Selatan	1	30	29	0	26	86
20	Kalimantan Timur	0	24	0	0	17	41
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
22	Sulawesi Utara	0	67	0	0	26	93
23	Gorontalo	0	12	1	0	0	13
24	Sulawesi Tengah	0	34	1	0	24	59
25	Sulawesi Tenggara	0	25	1	0	19	45
26	Sulawesi Barat	0	1	0	0	0	1
27	Sulawesi Selatan	17	99	28	0	81	225
28	Bali	13	67	19	0	37	136
29	Nusa Tenggara Barat	5	40	11	0	30	86
30	Nusa Tenggara Timur	0	18	6	0	16	40
31	Maluku	0	10	0	0	13	23
32	Maluku Utara	0	2	0	0	0	2
33	Papua	0	11	1	0	17	29
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
		133	1,473	465	253	855	3,179

Ket : PS : Perpustakaan Sekolah. PPT : Perpustakaan Perguruan Tinggi, PK : Perpustakaan Khusus, PN : Perpustakaan, PS : Perpustakaan Sekolah, PU : Perpustakaan Umum

Sumber : Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan, 2016

Berdasar data pada Tabel 14, jumlah tenaga perpustakaan yang tersebar di 34 provinsi Indonesia berjumlah 3.179 orang. Jumlah tersebut terdiri atas tenaga perpustakaan sekolah sebanyak 133 orang, perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 1.473 orang, perpustakaan

husus sebanyak 465 orang, Perpustnas sebanyak 253 orang, dan perpustakaan umum sebanyak 855 orang.

1.2.3.1 Tenaga Perpustakaan Sekolah

Mengingat jumlah perpustakaan sekolah di Indonesia sangat besar, yakni 121.187 unit perlu dipastikan ketersediaan tenaga perpustakaan secara cukup. Berikut ini jumlah tenaga perpustakaan sekolah yang tersebar di masing-masing provinsi dan analisis rasio kecukupannya. Sesuai dengan Pedoman Perpustakaan Sekolah IFLA/UNESCO tahun 2006, perpustakaan sekolah dikelola oleh sekurang-kurangnya dua tenaga perpustakaan, terdiri atas satu pustakawan dan satu tenaga teknis perpustakaan. Sebaran dan rasio ideal tenaga perpustakaan sekolah per provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Sebaran Tenaga Perpustakaan Sekolah per Provinsi

No.	Provinsi	Jumlah Pemustaka Potensial (Guru dan Siswa)	Jumlah Perpustakaan Sekolah	Jumlah Tenaga Perpustakaan Sekolah Ideal	Jumlah Tenaga Perpustakaan Sekolah (Terdata)	Kekurangan Tenaga
1	Aceh	1,210,101	2,257	4,514	0	4,514
2	Sumatera Utara	3,740,928	3,677	7,354	2	7,352
3	Riau	1,568,697	1,882	3,764	7	3,757
4	Kepulauan Riau	426,385	2,080	4,160	0	4,160
5	Bengkulu	469,680	2,728	5,456	0	5,456
6	Sumatera Barat	1,381,364	2,027	4,054	5	4,049
7	Jambi	809,682	1,716	3,432	5	3,427
8	Sumatera Selatan	1,879,301	2,610	5,220	11	5,209
9	Bangka Belitung	314,465	2,208	4,416	0	4,416
10	Lampung	1,812,125	5,528	11,056	37	11,019
11	Banten	2,559,041	1,820	3,640	2	3,638
12	DKI Jakarta	1,892,428	3,022	6,044	0	6,044
13	Jawa Barat	9,543,579	17,589	35,178	3	35,175
14	Jawa Tengah	6,953,681	21,564	43,128	19	43,109
15	DI.Yogyakarta	745,384	3,982	7,964	3	7,961
16	Jawa Timur	7,724,167	15,268	30,536	2	30,534
17	Kalimantan Barat	1,168,140	2,615	5,230	1	5,229
18	Kalimantan Tengah	611,865	1,174	2,348	0	2,348
19	Kalimantan Selatan	864,438	2,215	4,430	1	4,429
20	Kalimantan Timur	822,429	2,580	5,160	0	5,160
21	Kalimantan Utara	155,023	90	180	0	180
22	Sulawesi Utara	602,376	1,363	2,726	0	2,726
23	Gorontalo	293,452	1,317	2,634	0	2,634
24	Sulawesi Tengah	786,419	2,484	4,968	0	4,968
25	Sulawesi Tenggara	761,116	2,815	5,630	0	5,630
26	Sulawesi Barat	332,385	152	304	0	304
27	Sulawesi Selatan	2,226,699	4,892	9,784	17	9,767
28	Bali	916,032	3,759	7,518	13	7,505

No.	Provinsi	Jumlah Pemustaka Potensial (Guru dan Siswa)	Jumlah Perpustakaan Sekolah	Jumlah Tenaga Perpustakaan Sekolah Ideal	Jumlah Tenaga Perpustakaan Sekolah (Terdata)	Kekurangan Tenaga
29	Nusa Tenggara Barat	1,243,984	1,997	3,994	5	3,989
30	Nusa Tenggara Timur	1,542,240	2,210	4,420	0	4,420
31	Maluku	488,361	453	906	0	906
32	Maluku Utara	308,420	129	258	0	258
33	Papua	647,079	368	736	0	736
34	Papua Barat	240,107	613	1,226	0	1,226
JUMLAH		57,041,573	121,187	242,374	133	242,241

Sumber: Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, 2015
Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas, 2016

Berdasarkan Tabel 15, jika diperbandingkan antara jumlah pemustaka potensial berdasarkan jumlah total usia sekolah sebanyak 57.041.573 orang, dengan jumlah perpustakaan sekolah sebanyak 121.187 unit, maka jumlah tenaga perpustakaan sekolah ideal sebanyak 242.374 orang dengan rasio 1:2, atau satu perpustakaan sekolah memiliki dua tenaga perpustakaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah tenaga perpustakaan sekolah yang terdata. Jumlah tenaga perpustakaan sekolah yang terdata hanya sebanyak 133 orang. Dengan demikian, jika diperbandingkan dengan jumlah tenaga perpustakaan sekolah yang ideal maka terdapat kekurangan tenaga perpustakaan sebanyak 242.241 orang. Kondisi ini, sangat berdampak pada keberhasilan pencapaian tujuan perpustakaan sekolah, yakni mendukung prestasi akademik siswa. Standar IFLA tegas menyatakan bahwa semakin banyak tenaga perpustakaan tersedia di sekolah, semakin besar kemungkinan tercapai tujuan akademik siswa bersekolah.

1.2.3.2 Tenaga Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum keberadaannya sangat erat dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, tenaga perpustakaan umum sangat berperan penting terhadap pelayanan yang diberikan kepada pemustaka dengan latar belakang profesi, usia, gender, status sosial dan ekonomi yang berbeda. Kualitas layanan perpustakaan sangat berpengaruh terhadap persepsi dan jumlah penggunaan perpustakaan umum sebagai ruang publik bagi masyarakat untuk berinteraksi, mengembangkan inovasi dan memperoleh inspirasi (*Library 3.0*). Perpustakaan umum keberadaannya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Sebaran

tenaga perpustakaan umum per-provinsi dan rasio ketersediaan ideal sesuai dengan standar IFLA.

Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum sesuai dengan Standard IFLA Tahun 2006, ialah 1:2.500. Atau satu tenaga perpustakaan umum melayani 2.500 orang penduduk. Sebaran dan rasio ideal tenaga perpustakaan umum per provinsi dapat dilihat pada table 16 berikut.

Tabel 16. Sebaran dan Rasio Ideal Tenaga Perpustakaan Umum per Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Perpustakaan Umum (Terdata)	Jumlah Ideal Menurut IFLA	Kekurangan Tenaga Perpustakaan
				(1:2500)	
1	Aceh	5,002,000	27	2,001	1,974
2	Sumatera Utara	13,937,800	48	5,575	5,527
3	Riau	6,344,400	41	2,538	2,497
4	Kepulauan Riau	1,973,000	3	789	786
5	Bengkulu	1,874,900	13	750	737
6	Sumatera Barat	5,196,300	14	2,079	2,065
7	Jambi	3,402,100	30	1,361	1,331
8	Sumatera Selatan	8,052,300	35	3,221	3,186
9	Bangka Belitung	1,372,800	14	549	535
10	Lampung	8,117,300	12	3,247	3,235
11	Banten	11,955,200	9	4,782	4,773
12	DKI Jakarta	10,177,900	274	4,071	4,050
13	Jawa Barat	46,709,600	49	18,684	18,635
14	Jawa Tengah	33,774,100	86	13,510	13,424
15	DI.Yogyakarta	3,679,200	44	1,472	1,428
16	Jawa Timur	38,847,600	68	15,539	15,471
17	Kalimantan Barat	4,789,600	8	1,916	1,908
18	Kalimantan Tengah	2,495,000	27	998	971
19	Kalimantan Selatan	3,989,800	26	1,596	1,570
20	Kalimantan Timur	3,426,600	17	1,371	1,354
21	Kalimantan Utara	641,900	0	257	257
22	Sulawesi Utara	2,412,100	26	965	939
23	Gorontalo	1,133,200	0	453	453
24	Sulawesi Tengah	2,876,700	24	1,151	1,127
25	Sulawesi Tenggara	2,499,500	19	1,000	981
26	Sulawesi Barat	1,282,200	0	513	513
27	Sulawesi Selatan	8,520,300	81	3,408	3,327
28	Bali	4,152,800	37	1,661	1,624
29	Nusa Tenggara Barat	4,835,600	30	1,934	1,904
30	Nusa Tenggara Timur	5,120,100	16	2,048	2,032
31	Maluku	1,686,500	13	675	662
32	Maluku Utara	1,162,300	0	465	465
33	Papua	3,149,400	17	1,260	1,243
34	Papua Barat	871,500	0	349	349
		255,461,700	855	102,185	101,330

Sumber: BPS tahun 2016, Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpunas tahun 2016, Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Perpunas, tahun 2016

Berdasarkan Tabel 16, jumlah tenaga perpustakaan umum di Indonesia yang terdata sebanyak 855 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah pengguna potensial perpustakaan umum yang identik dengan jumlah penduduk, maka jumlah tenaga perpustakaan umum idealnya sebanyak 102.185 orang. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum sesuai dengan Standard IFLA ialah 1:2500 atau satu tenaga perpustakaan umum melayani 2.500 orang penduduk. Dengan demikian, kondisi tenaga perpustakaan umum saat ini, tidak ideal. Berdasarkan analisis rasio di atas, terdapat kekurangan tenaga perpustakaan umum sebanyak 101.330 orang. Kekurangan tenaga perpustakaan umum secara merata hampir di seluruh provinsi di Indonesia ini, dikhawatirkan berdampak pada kualitas layanan perpustakaan umum dan tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat tidak optimal.

1.2.3.3 Tenaga Perpustakaan Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 41 menyebutkan bahwa sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh perguruan tinggi sesuai dengan program studi yang dikembangkan. Perpustakaan pendidikan tinggi merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang bertugas untuk menghimpun, memilih, mengolah, merawat serta melayani sumber belajar sesuai dengan program studi yang dikembangkan perguruan tinggi. Ada pun yang termasuk dalam pendidikan tinggi meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik dan atau pendidikan tinggi lain yang sederajat.

Keberadaan tenaga perpustakaan pendidikan tinggi sangat penting dalam menunjang aktifitas dan prestasi akademis mahasiswa. Sesuai dengan SNP Perguruan Tinggi 2013, pustakawan perguruan tinggi adalah pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dihitung berdasarkan perbandingan satu pustakawan, satu tenaga teknis perpustakaan dan satu tenaga administrasi, atau dengan komposisi proporsional 1:2, jadi total tiga orang. IFLA memberikan panduan tenaga perpustakaan perguruan tinggi disesuaikan dengan kebutuhan operasional

dan layanan tersedia. Berikut ini data sebaran dan rasio ideal tenaga perpustakaan pendidikan tinggi per-provinsi.

Tabel 17. Sebaran dan Rasio Ideal Tenaga Perpustakaan Pendidikan Tinggi

No	Provinsi	Jumlah Pemustaka Potensial (Dosen dan Mahasiswa)	Jumlah Tenaga Perpustakaan PT (Terdata)	Jumlah Perpustakaan PT	Jumlah Tenaga Perpustakaan PT Ideal	Kekurangan Tenaga
1	Aceh	178,620	52	48	144	92
2	Sumatera Utara	460,040	47	113	339	292
3	Riau	162,780	29	56	168	139
4	Kepulauan Riau	43,470	0	14	42	42
5	Bengkulu	55,889	27	30	90	63
6	Sumatera Barat	198,799	89	36	108	19
7	Jambi	79,218	18	18	54	36
8	Sumatera Selatan	196,800	21	42	126	105
9	Bangka Belitung	12,753	0	12	36	36
10	Lampung	141,913	25	60	180	155
11	Banten	213,205	36	77	231	195
12	DKI Jakarta	985,497	94	282	846	752
13	Jawa Barat	814,805	97	240	720	623
14	Jawa Tengah	561,616	168	268	804	636
15	DI.Yogyakarta	384,822	139	192	576	437
16	Jawa Timur	902,786	158	375	1,125	967
17	Kalimantan Barat	91,176	21	32	96	75
18	Kalimantan Tengah	34,234	12	26	78	66
19	Kalimantan Selatan	90,836	30	75	225	195
20	Kalimantan Timur	109,619	24	44	132	108
21	Kalimantan Utara	438	0	0	0	0
22	Sulawesi Utara	71,458	67	24	72	5
23	Gorontalo	35,674	12	18	54	42
24	Sulawesi Tengah	76,070	34	24	72	38
25	Sulawesi Tenggara	72,982	25	18	54	29
26	Sulawesi Barat	18,244	1	4	12	11
27	Sulawesi Selatan	341,465	99	119	357	258
28	Bali	101,925	67	36	108	41
29	Nusa Tenggara Barat	109,516	40	48	144	104
30	Nusa Tenggara Timur	73,532	18	38	114	96
31	Maluku	37,937	10	18	54	44
32	Maluku Utara	40,349	2	6	18	16
33	Papua	60,283	11	24	72	61
34	Papua Barat	29,054	0	6	18	18
		6,787,805	1,473	2,428	7,284	5,811

Sumber : BPS tahun 2016, Pusat Pengembangan Pustakawan Perpunas tahun 2016,

Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat baca tahun 2016

Berdasarkan data pada tabel 17, jumlah tenaga perpustakaan pendidikan tinggi di Indonesia 1.473 orang. Jumlah tenaga perpustakaan pendidikan tinggi sesuai dengan SNP dan IFLA idealnya sebanyak 7.284

orang, dengan rasio 1:3, atau satu perpustakaan pendidikan tinggi memiliki tiga tenaga perpustakaan. Berdasarkan analisis rasio ini, kondisi tenaga perpustakaan pendidikan tinggi saat ini tidak ideal. Yakni, masih terdapat kekurangan tenaga perpustakaan pendidikan tinggi sebanyak 5.811 orang, yang tersebar di beberapa provinsi. Kekurangan tenaga perpustakaan ini, sangat berdampak pada kinerja perpustakaan pendidikan tinggi, dalam mendukung aktivitas civitas akademika dan prestasi akademis mahasiswa secara keseluruhan.

1.2.3.4. Tenaga Perpustakaan Khusus

Perpustakaan khusus ialah institusi/unit kerja pengelola karya tulis, karya cetak, dan karya rekam, yang dikelola secara profesional berdasarkan sistem yang baku untuk mendukung kelancaran/keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan instansi induk yang menaunginya. Sesuai dengan SNP 010:2011, Jumlah sumber daya manusia sekurang-kurangnya tiga orang, terdiri atas 1 (satu) kepala perpustakaan, 1 (satu) tenaga pustakawan dan 1 (satu) tenaga teknis. Perbandingan SDM adalah 1:1 yaitu 1 (satu) tenaga pustakawan, dan 1 (satu) tenaga teknis. Sebaran dan rasio ideal tenaga perpustakaan khusus per-provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 18. Sebaran dan Rasio Ideal Tenaga Perpustakaan Khusus Per-Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Pemustaka Potensial (usia produktif 15-60 th)	Jumlah Tenaga Perpustakaan Khusus (Terdata)	Jumlah Perpustakaan Khusus	Jumlah Tenaga Perpustakaan Khusus Ideal	Kekurangan Tenaga
1	Aceh	3,440,634	1	239	239	238
2	Sumatera Utara	9,498,974	4	45	45	41
3	Riau	4,383,550	3	33	33	30
4	Kepulauan Riau	1,370,889	0	61	61	61
5	Bengkulu	1,345,754	1	239	239	238
6	Sumatera Barat	3,634,236	5	17	17	12
7	Jambi	2,450,464	7	11	11	4
8	Sumatera Selatan	5,741,308	7	28	28	21
9	Bangka Belitung	998,120	0	5	5	5
10	Lampung	5,841,965	1	273	273	272
11	Banten	8,571,590	10	22	22	12
12	DKI Jakarta	7,670,587	203	818	818	615
13	Jawa Barat	34,117,483	88	1,268	1,268	1,180
14	Jawa Tengah	25,492,463	11	278	278	267
15	DI. Yogyakarta	2,882,980	15	367	367	352
16	Jawa Timur	29,884,845	10	868	868	858
17	Kalimantan Barat	3,383,166	2	206	206	204
18	Kalimantan Tengah	1,789,517	0	145	145	145
19	Kalimantan Selatan	2,850,029	29	256	256	227
20	Kalimantan Timur	2,467,511	0	595	595	595
21	Kalimantan Utara	446,170	0	0	0	0

No	Provinsi	Jumlah Pemustaka Potensial (usia produktif 15-60 th)	Jumlah Tenaga Perpustakaan Khusus (Terdata)	Jumlah Perpustakaan Khusus	Jumlah Tenaga Perpustakaan Khusus Ideal	Kekurangan Tenaga
22	Sulawesi Utara	1,793,705	0	72	72	72
23	Gorontalo	813,506	1	0	0	0
24	Sulawesi Tengah	2,050,492	1	228	228	227
25	Sulawesi Tenggara	1,665,095	1	239	239	238
26	Sulawesi Barat	877,444	0	6	6	6
27	Sulawesi Selatan	6,081,875	28	134	134	106
28	Bali	3,141,285	19	156	156	137
29	Nusa Tenggara Barat	3,390,084	11	250	250	239
30	Nusa Tenggara Timur	3,332,400	6	139	139	133
31	Maluku	1,128,137	0	56	56	56
32	Maluku Utara	773,181	0	0	0	0
33	Papua	2,189,230	1	78	78	77
34	Papua Barat	602,248	0	0	0	0
		186,100,917	465	7,132	7,132	6,667

Sumber : BPS tahun 2016, Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpunas tahun 2016, Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat baca, Perpunas tahun 2016

Berdasarkan Tabel 18, jumlah tenaga perpustakaan khusus di Indonesia yang terdata sebanyak 465 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah tenaga perpustakaan khusus idealnya sebanyak 7.132 orang, dengan rasio 1:1, satu perpustakaan khusus memiliki satu tenaga perpustakaan. Berdasarkan data kondisi ketersediaan tenaga perpustakaan khusus saat ini, maka terdapat kekurangan tenaga perpustakaan khusus sebanyak 6.667 orang, Kekurangan tenaga perpustakaan khusus ini berdampak pada kinerja perpustakaan khusus dan peran perpustakaan khusus dalam berkontribusi terhadap kinerja lembaga induknya tidak signifikan.

1.2.3.5 Uji Kompetensi Tenaga Pustakawan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, kenaikan jenjang jabatan fungsional pustakawan selain memenuhi angka kredit yang ditentukan, saat ini disyaratkan untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jabatan. Ketentuan ini mulai dilaksanakan bulan Juli 2016 sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Kepala Perpustakaan Nasional tentang Jabatan Fungsional Pustakawan. Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jabatan adalah dengan melakukan uji kompetensi tertulis secara serentak

di setiap provinsi. Materi uji yang akan diujikan berasal dari butir kegiatan sesuai Peraturan Menpan RB Nomor 9 tahun 2016 yang telah ditetapkan pada Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Jabatan Fungsional Pustakawan, materi tersebut disusun dan diujikan berdasarkan jenjang jabatan fungsional pustakawan yang akan ditempuh. Berikut ini data tenaga pustakawan yang telah mengikuti uji kompetensi.

Tabel 19. Sebaran Uji Kompetensi Pustakawan per-Provinsi

No	Provinsi	Keterangan		Jumlah Peserta	Jumlah Perprovinsi
		Lulus	Belum Lulus		
1	Aceh	0	0	0	80
2	Sumatera Utara	6	0	6	101
3	Riau	6	0	6	80
4	Kepulauan Riau	0	0	0	3
5	Bengkulu	1	0	1	41
6	Sumatera Barat	0	0	0	113
7	Jambi	0	0	0	60
8	Sumatera Selatan	9	3	12	74
9	Bangka Belitung	0	0	0	14
10	Lampung	0	0	0	75
11	Banten	4	0	4	57
12	DKI Jakarta	3	0	3	571
13	Jawa Barat	8	0	8	237
14	Jawa Tengah	2	0	2	284
15	DI.Yogyakarta	36	6	42	201
16	Jawa Timur	40	3	43	238
17	Kalimantan Barat	0	0	0	32
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	39
19	Kalimantan Selatan	0	0	0	86
20	Kalimantan Timur	0	0	0	41
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0
22	Sulawesi Utara	0	0	0	93
23	Gorontalo	0	0	0	13
24	Sulawesi Tengah	0	0	0	59
25	Sulawesi Tenggara	0	0	0	45
26	Sulawesi Barat	0	0	0	1
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	225
28	Bali	13	3	16	136
29	Nusa Tenggara Barat	35	1	36	86
30	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	40
31	Maluku	0	0	0	23
32	Maluku Utara	0	0	0	2
33	Papua	0	0	0	29
34	Papua Barat	0	0	0	0
		163	16	179	3,179

Sumber: Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan, 2016.

Berdasarkan Tabel 19, Nampak bahwa jumlah pustakawan di Indonesia tahun 2016 berjumlah 3.179 orang pustakawan. Dari jumlah tersebut, pustakawan yang mendaftar atau mengikuti uji kompetensi hanya sebesar 5.63% atau 179 pustakawan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 pustakawan atau sebanyak 5.13% yang dinyatakan lulus uji kompetensi, sehingga dapat naik ke jenjang jabatan berikutnya. Dengan demikian

jumlah dan daerah yang melakukan uji kompetensi pustakawan masih sangat jauh dari ideal. Hal ini memerlukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, misalnya dengan melibatkan Balai Diklat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di seluruh provinsi.

1.2.3.6 Sertifikasi Tenaga Perpustakaan

Tatanan atau sistem manajemen sertifikasi profesi suatu negara yang mencakup keterkaitan komponen-komponen sertifikasi profesi nasional yang komprehensif dan sinergi dalam rangka mencapai tujuan sertifikasi kompetensi kerja nasional di Indonesia. Sistem sertifikasi profesi nasional terdiri atas empat subsistem yaitu: pengembangan skema sertifikasi, penerapan sertifikasi, harmonisasi, dan pengendalian dan peningkatan berlanjut. Di Indonesia otoritas sertifikasi profesi adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004. Tujuan sertifikasi profesi adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran baik formal, non formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja, dalam dunia kerja kompetensi harus dipelihara.

Perpustakaan Nasional telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan bekerja sama dengan pihak ketiga, melalui Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang LSP Pustakawan. LSP Pustakawan ini bersifat independen, dengan menerapkan skema sertifikasi berdasarkan klaster (pemaketan kompetensi). Pelaksanaan sertifikasi yang mencakup perencanaan dan pengorganisasian asesmen, pengembangan perangkat asesmen dan pelaksanaan asesmen. Berikut ini data tenaga perpustakaan yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi bidang perpustakaan per provinsi.

Tabel 20. Sebaran Sertifikasi Tenaga Perpustakaan Per-Provinsi

No	Provinsi	K	BK	Jumlah
1	Aceh	13	4	17
2	Sumatera Utara	34	9	43
3	Riau	20	14	34
4	Kepulauan Riau	0	0	0
5	Bengkulu	7	0	7
6	Sumatera Barat	14	12	26
7	Jambi	8	10	18
8	Sumatera Selatan	17	11	28
9	Bangka Belitung	0	0	0
10	Lampung	4	1	5
11	Banten	5	1	6
12	DKI Jakarta	173	61	234

No	Provinsi	K	BK	Jumlah
13	Jawa Barat	19	3	22
14	Jawa Tengah	7	3	10
15	DI.Yogyakarta	58	10	68
16	Jawa Timur	56	11	67
17	Kalimantan Barat	0	0	0
18	Kalimantan Tengah	0	0	0
19	Kalimantan Selatan	3	9	12
20	Kalimantan Timur	1	0	1
21	Kalimantan Utara	0	0	0
22	Sulawesi Utara	0	0	0
23	Gorontalo	0	0	0
24	Sulawesi Tengah	8	12	20
25	Sulawesi Tenggara	0	0	0
26	Sulawesi Barat	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	15	9	24
28	Bali	14	10	24
29	Nusa Tenggara Barat	22	4	26
30	Nusa Tenggara Timur	0	0	0
31	Maluku	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0
33	Papua	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0
		498	194	692

Sumber: Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpunas Tahun 2016

Keterangan: K : Kompeten BK : Belum kompeten

Berdasarkan Tabel 20, nampak bahwa dari jumlah tenaga perpustakaan berjumlah 3.179 orang, sebanyak 21.77% atau 692 orang yang telah mendaftar untuk mengikuti sertifikasi, dan sebanyak 498 orang atau sebanyak 16.29% yang dinyatakan kompeten. Dengan demikian, dibutuhkan lebih banyak lagi tenaga perpustakaan yang kompeten agar pengelolaan perpustakaan di Indonesia lebih optimal. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 20 provinsi yang telah mengirimkan tenaga perpustakaannya untuk mengikuti sertifikasi, 14 provinsi belum melakukan hal ini. Untuk mengatasi hal ini agar sertifikasi tidak terpusat di Jakarta, tapi dapat dilakukan secara mandiri di setiap provinsi.

1.2.4 Pemustaka

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 255.461.700 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk 1,38% per-tahun. Saat ini terdapat penduduk produktif, atau di atas usia 15 tahun, sebesar 186.100.917 jiwa, dengan jumlah usia sekolah sebesar 16.734.903 jiwa. Sementara itu, Produk Domestik Bruto sebesar 1.154 triliun rupiah, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8%/tahun. Dari segi demografi, wilayah Indonesia lebih banyak didominasi oleh lautan

dengan 17.504 pulau. Dari total 82.190 Desa/kelurahan di Indonesia terdapat sejumlah 12.827 desa/kelurahan berada di tepi laut dan perairan.

Berdasarkan kondisi kependudukan di atas, perpustakaan memiliki prospek yang sangat menggembirakan untuk dikembangkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, di sisi lain kondisi pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat saat ini terhitung rendah. Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat sesuai dengan jenis perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Jumlah Kunjungan Pemustaka Berdasar Jenis Perpustakaan

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH PERPUSTAKAAN	PEMUSTAKA/TAHUN
1	Perpustakaan Nasional	1	22,247,976
2	Perpustakaan Umum Provinsi	33	6,417,883
3	Perpustakaan Umum Kab/Kota	467	25,333,994
4	Perpustakaan Umum Kecamatan	600	18,487,200
5	Perpustakaan Desa/Kelurahan	21,467	7,728,120
6	Perpustakaan Komunitas	1044	375,840
7	Perpustakaan Khusus	7,132	3,423,360
8	SD/MI	100,000	12,000,000
9	SMP/MTS	12,000	4,320,000
10	SMA/SMK/MA	6,599	2,375,640
11	Pondok Pesantren	2,588	931,680
12	Perguruan Tinggi	2,428	1,456,800
	Jumlah	154,359	105,098,493

Sumber: Perpunas, 2016.

Berdasarkan data kunjungan pemustaka ke semua jenis perpustakaan di atas, ketika dilakukan perbandingan dengan jumlah penduduk Indonesia sebagai pengguna potensial perpustakaan, maka jumlah total kunjungan 105.098.493 kali, maknanya hanya sekitar 41% penduduk Indonesia yang mengunjungi perpustakaan. Sebaran angka pemanfaatan perpustakaan per-provinsi dapat ditingkatkan. Hal ini sangat dimungkinkan dengan melihat perbandingan jumlah potensial pengguna perpustakaan dibandingkan dengan jumlah ketersediaan berbagai jenis perpustakaan di provinsi sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 22. . Potensi Pemanfaatan Perpustakaan Berdasarkan Jumlah Pemustaka Potensial dan Jumlah Perpustakaan Berdasarkan Jenis dan Provinsi

NO	Kepulauan	Jumlah Pemustaka Potensial	Perpustakaan					Potensi Kunjungan (%)
			PU	PK	PS	PPT	Jumlah	
1	Sumatera	55,272,900	8,384	952	26,713	429	36,478	0.066
2	Jawa	145,143,600	5,881	3,621	63,245	1,434	74,181	0.051
3	Kalimantan	15,342,900	2,038	1,202	8,674	178	12,092	0.079
4	Sulawesi	18,724,000	3,009	679	13,023	209	16,920	0.090
5	Bali dan Nusa Tenggara	14,108,500	1,478	544	7,967	122	10,111	0.072
6	Maluku	2,848,800	694	56	583	25	1,358	0.048
7	Papua	4,020,900	2,127	78	982	31	3,218	0.080
Jumlah		255,461,700	23,611	7,132	121,187	2,428	154,359	0.097

PU: Perpustakaan Umum, PK: Perpustakaan Khusus, PS: Perpustakaan Sekolah, PPT: Perpustakaan perguruan Tinggi

Sumber: Pusat pengembangan dan Pengkajian Minat Baca, Perpunas, 2016.

Terlihat pada Tabel 22 di atas, bahwa jumlah kunjungan riil ke perpustakaan di Indonesia hanya sebesar 0,097%, atau masih sangat jauh dari rata-rata Standar Nasional Perpustakaan, di mana perpustakaan setidaknya-tidaknya memperoleh kunjungan 2% dari jumlah penduduk di daerahnya. Kondisi ini perlu segera diperbaiki agar jumlah kunjungan riil perpustakaan bisa lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Sementara itu menurut hasil survei yang dilakukan oleh APJII, tahun 2016, tentang penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia ditemukan bahwa:

1. Pengguna internet sejak 2014 sebanyak 88,1 juta orang telah meningkat 50,5% di tahun 2016 menjadi 132,7 juta orang.
2. Penetrasi penggunaan Internet Indonesia mencapai 132,7 juta orang (51,8%) dengan komposisi laki-laki 52,5% dan perempuan 47,5%. Penduduk pengguna internet didominasi di pulau Jawa yang mencapai 86,3 juta orang (65%), diikuti oleh Sumatera 15,7%, Sulawesi 6,3%, Kalimantan 5,8%, Bali & Nusa 4,7%, dan Maluku & Papua 2,5%.
3. Kelompok usia pengguna internet didominasi oleh usia 35-44 tahun sebanyak 38,7 juta orang, usia 25-34 tahun sebanyak 32,3 juta orang, atau total mencapai 53,6%. Sisanya kelompok usia 10-24 tahun sebanyak 18,4%, 45-54 tahun sebanyak 18%, dan ≥55

tahun sebanyak 10%. Terkait *digital native* dengan rentang usia 12-34 tahun jumlahnya sebanyak 58,4% dari jumlah penduduk di Indonesia.

4. Penetrasi penggunaan internet berdasarkan pekerjaan adalah mahasiswa (89,7%), pelajar (69,8%), dan pekerja (58,4%).
5. Tempat mengakses internet kini tidak lagi dibatasi dari tempat tertentu, hal ini ditandai bahwa 69,9% (92,8 juta) pengguna internet dapat mengaksesnya dari mana saja.
6. Motif pengaksesan internet sebanyak 25,3% (31,3 juta) orang untuk *update* informasi, 20,8% (27,6 juta) orang untuk menunjang pekerjaan dan 13,5% (17,9 juta) orang untuk mengisi waktu luang.
7. Perangkat yang digunakan untuk mengakses internet adalah *mobile (gadget)* sebanyak 98,3% (130,3 juta orang) dengan 67,2 juta di antaranya juga menggunakan komputer.
8. Konten internet yang sering diakses adalah media sosial (97,4%), hiburan (96,8%), berita (96,4%), pendidikan (93,8%), komersial (93,1%), dan layanan publik (91,6%).
9. Media sosial yang sering dikunjungi adalah *facebook* dengan tujuan berbagi informasi (97,5%), berdagang (94,6%), sosialisasi kebijakan pemerintah (90,4%), berdakwah agama (81,9%), dan berpolitik (75,6%).
10. Konten pendidikan yang sering dikunjungi adalah Wikipedia.

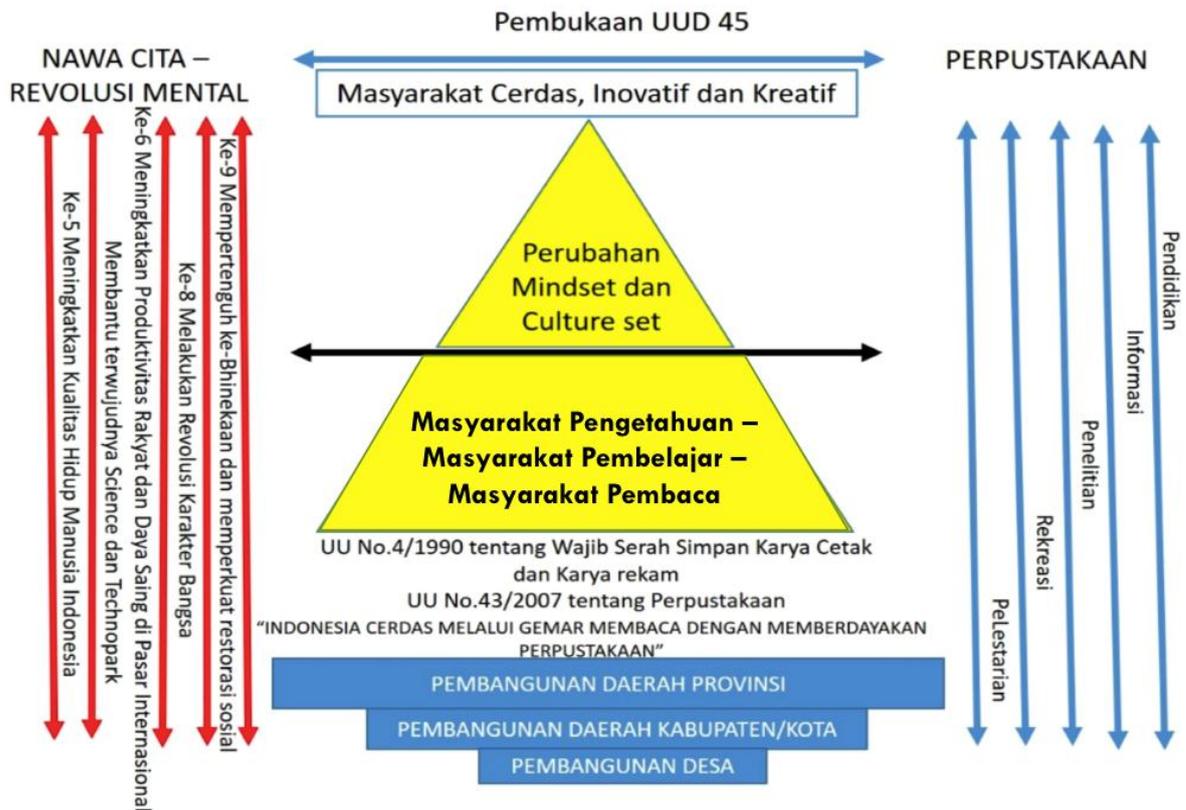
Fenomena peningkatan penggunaan perangkat bergerak berbasis *smartphone* dan *tablet* makin meningkat. Perangkat yang semakin mudah dan murah, serta ketersediaan konten dan aplikasi *mobile* yang semakin berkembang, menunjukkan kecenderungan penggunaan perangkat ini untuk layanan perpustakaan tidak dapat dikesampingkan. Saat ini Peluang akses untuk informasi dan bahan perpustakaan berbasis digital semakin meningkat. Perpustakaan Nasional mempunyai berbagai jenis koleksi dalam bentuk digital seperti dokumen *fulltext*, gambar, serta audio visual. Untuk itu perlu adanya konvergensi antara layanan perpustakaan konvensional dan digital.

1.3 Kerangka Berpikir

1.3.1 Revolusi Mental Melalui Budaya Baca

Agenda Nawa Cita pada butir ke-8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa dan butir ke-7 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, dapat dilaksanakan dengan percepatan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 48 ayat 1, pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. Pasal 50 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Melalui kebiasaan membaca seseorang melakukan transformasi informasi dan pengetahuan. Seseorang yang telah memiliki informasi dan pengetahuan secara memadai, memungkinkan dirinya berfikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif. Perpustakaan sebagai bagian sistem pembangunan nasional memiliki peran strategis dalam perwujudan revolusi mental, melalui kegiatan pembudayaan kegemaran membaca di masyarakat. Keterkaitan perpustakaan dalam perwujudan Nawa Cita dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Model Keterkaitan Pembukaan UUD 1945, Nawa Cita dan Fungsi Perpustakaan

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan akses publik ke informasi dan sumbernya yang memberi keamanan dan kepada semua golongan.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menjalankan pemerintahan di bidang perpustakaan dan dokumentasi secara bersih, efektif dan transparan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan memberikan akses informasi pada daerah pinggiran dan desa agar mampu mempunyai kesempatan yang sama dengan daerah lain.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Perpustakaan mendukung nawacita ini dengan memberikan akses informasi mengenai reformasi hukum dan penegakan hukum yang bersih, bebas korupsi bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar,

Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Perpustakaan mendukung Nawacita ini melalui:

- Akses publik ke informasi dan sumbernya yang memberi kesempatan kepada semua orang untuk memperbaiki kehidupan mereka
 - Pelatihan keterampilan baru yang dibutuhkan untuk pendidikan & pekerjaan
 - Informasi untuk mendukung pembuatan keputusan pemerintah, masyarakat madani dan bisnis untuk menanggulangi kemiskinan
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Perpustakaan mendukung Nawacita ini dengan menyediakan akses informasi untuk mendapatkan informasi pelatihan keterampilan yang dibutuhkan semua orang untuk pengembangan usaha yang lebih baik.
 7. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Perpustakaan mendukung Nawacita ini melalui menyediakan akses informasi untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk mempersiapkan diri rakyat dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional.
 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Perpustakaan mendukung Nawacita ini melalui menyediakan akses informasi untuk mendapatkan informasi peningkatan karakter nasional bangsa Indonesia.
 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan. Perpustakaan mendukung Nawacita ini melalui menyediakan akses informasi untuk meningkatkan kebhinekaan bangsa Indonesia.

1.3.2 Perpustakaan Menghimpun dan Melestarikan Warisan Dokumenter Bangsa

Keberadaan perpustakaan tidak dapat terpisahkan dengan warisan dokumenter bangsa. Hal ini dikarenakan bahwa seluruh karya tulis, cetak dan rekam sebagai karya intelektual bangsa dihimpun, dikelola dan dilestarikan di perpustakaan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Pasal 1 ayat (5-6) mengamanatkan bahwa Perpustakaan Nasional mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan

dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia.

Selain itu, perpustakaan sebagai pelestari khazanah karya intelektual bangsa, khususnya dalam wujud naskah kuno, selain dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pelestarian warisan dokumenter bangsa mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan perpustakaan, dokumen dan arsip, termasuk di dalamnya kebijakan pengelolaan, keuangan, sumber daya manusia, metode, dan teknik penyimpanannya. Bahan perpustakaan yang dimaksud, termasuk di dalamnya manuskrip atau naskah kuno.

Tujuan pelestarian bahan perpustakaan adalah melestarikan kandungan informasi yang ada di dalamnya agar terus dapat dimanfaatkan selama-lamanya. Pelestarian bahan perpustakaan meliputi alih bentuk media ke media lain, atau melestarikan bentuk aslinya selengkap mungkin untuk dapat digunakan secara optimal melalui dua pendekatan, yakni terhadap fisik naskah dan pendekatan terhadap teks dalam naskah (isi naskah).

1.3.3 Layanan Perpustakaan Sebagai Hak Masyarakat

Fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*), demokratis, berkeadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Selaras dengan amanah UNESCO SDGs 2015 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) menyebutkan sebagai berikut.



Gambar 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 17 butir berikut: 1) pengentasan kemiskinan; 2) tidak adanya kelaparan; 3) kesehatan dan kesejahteraan yang baik; 4) pendidikan berkualitas; 5) kesetaraan gender; 6) air bersih dan sanitasi; 7) energi bersih dan terjangkau; 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) industri, inovasi dan infrastruktur; 10) mengurangi kesenjangan; 11) kota dan komunitas berkelanjutan; 12) konsumsi dan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan; 13) mengenai perubahan iklim; 14) pemeliharaan sumber daya laut; 15) pemeliharaan sumber daya darat; 16) kedamaian, keadilan dan lembaga yang efektif institusi yang kuat; 17) kerja sama global untuk mencapai tujuan.

Perpustakaan memiliki peluang untuk berperan dalam menyukseskan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya:

1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya, dimana saja. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
 - Akses publik ke informasi dan sumbernya yang memberi kesempatan kepada semua orang untuk memperbaiki kehidupan mereka
 - Pelatihan keterampilan baru yang dibutuhkan untuk pendidikan dan pekerjaan
 - Informasi untuk mendukung pembuatan keputusan pemerintah, masyarakat madani dan bisnis untuk menanggulangi kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan dan mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi dan memajukan pertanian berkelanjutan, Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
 - Hasil riset dan data pertanian tentang bagaimana meningkatkan tanaman pangan yang lebih produktif dan berkelanjutan

- Akses publik bagi petani ke sumber-sumber daring (*online*), misal harga-harga komoditi di pasar lokal, laporan cuaca, dan alat pertanian baru
3. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan semua orang di semua usia. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
 - Hasil riset di perpustakaan rumah sakit dan (lembaga) kesehatan untuk mendukung pendidikan dan praktik medis bagi penyedia layanan kesehatan.
 - Akses publik tentang informasi kesehatan di perpustakaan umum untuk membantu individu dan keluarganya agar hidup sehat.
 4. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
 - Staf yang didedikasikan untuk mendukung program literasi usia dini dan pembelajaran sepanjang hayat
 - Akses ke informasi dan penelitian untuk semua siswa dimanapun
 - Ruang (dan peluang) inklusif dimana biaya bukan penghalang untuk (menambah) pengetahuan dan keterampilan baru
 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
 - Ruang-ruang (perpustakaan) yang aman dan ramah.
 - Program dan layanan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan perempuan, seperti, informasi tentang hak (perempuan) dan kesehatan.
 - Akses untuk mendapatkan informasi dan TIK yang membantu perempuan membangun keterampilan bisnis.
 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Akses untuk mendapatkan informasi berkualitas dan praktik-praktik terbaik yang mendukung pengelolaan air lokal dan proyek sanitasi
 7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Perpustakaan mendukung akses gratis dan terpercaya untuk mendapatkan listrik dan penerangan untuk membaca, belajar dan bekerja

8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan akses untuk mendapatkan informasi pelatihan keterampilan yang dibutuhkan semua orang untuk mencari, melamar dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
 - Perpustakaan umum dan perpustakaan khusus yang tersebar luas dan pustakawan yang profesional
 - Ruang-ruang publik yang ramah dan inklusif
 - Akses untuk mendapatkan TIK, misalnya akses internet berkecepatan tinggi yang mungkin tidak tersedia di tempat lain.
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antara negara. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
 - Ruang-ruang yang ramah dan netral untuk pembelajaran yang terbuka bagi semua orang termasuk kelompok yang termarginalkan seperti: imigran, pengungsi, golongan minoritas, masyarakat lokal dan penyandang disabilitas.
 - Akses yang setara untuk mendapatkan informasi yang mendukung keterlibatan ekonomi, politik dan sosial
11. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
 - Lembaga/institusi terpercaya yang diabdikan untuk mempromosikan keterlibatan dan pemahaman tentang kebudayaan
 - Dokumentasi dan preservasi/pelestarian kekayaan/khasanah kebudayaan untuk generasi mendatang
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan, perpustakaan mendukung Sistem berkelanjutan untuk berbagi dan mensirkulasikan bahan (perpustakaan) yang mengurangi limbah.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, perpustakaan mendukung rekod/catatan/dokumentasi historis tentang penggunaan daratan dan perubahan pantai
14. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang

berkelanjutan. Perpustakaan mendukung dengan menyediakan hasil riset dan data yang diperlukan untuk menginformasikan kebijakan perubahan cuaca

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Perpustakaan mendukung dengan menyediakan akses terbuka untuk mendapatkan informasi untuk pedoman pembuatan keputusan oleh pemerintah lokal dan nasional tentang berbagai hal/kegiatan, misalnya berburu, memancing, penggunaan lahan, dan pengelolaan air.
16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan:
 - Akses publik untuk mendapatkan informasi tentang pemerintahan, masyarakat madani, dan insitutusi/lembaga lainnya
 - Pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami dan menggunakan informasi tersebut di atas
 - Ruang-ruang inklusif dan bebas/netral untuk anggota masyarakat sebagai tempat bertemu dan berorganisasi.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Perpustakaan mendukung tujuan ini dengan menyediakan jaringan global dari lembaga-lembaga berbasis komunitas, diutamakan untuk mendukung rencana pengembangan/pembangunan lokal/nasional.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada pasal 5 mengatur hak, kewajiban masyarakat dan kewenangan pemerintah bahwa; (i) masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan; (ii) masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus (iii) masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Selaras dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Urusan wajib perpustakaan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah.

Tabel 23. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

NO.	SUB-URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Pembinaan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar dan akreditasi perpustakaan b. Pengelolaan perpustakaan tingkat nasional c. Pembudayaan kegemaran membaca tingkat nasional 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi b. Pembudayaan kegemaran membaca tingkat daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota b. Pembudayaan kegemaran membaca tingkat daerah kabupaten/kota
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi nasional b. Penerbitan katalog induk nasional dan bibliografi nasional c. Pelestarian naskah kuno dan pengembalian naskah kuno dari luar d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang berasal dari luar negeri dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di daerah provinsi. b. Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah. c. Pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
3.	Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	Penyelenggaraan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan		

Untuk itu perlu penguatan fungsi pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan berbasis kewilayahan, yaitu dengan mencermati pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dengan usaha mencerdaskan kehidupan masyarakat.

1.3.4 Konvergensi Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh amat besar terhadap segala aspek kehidupan saat ini. Pesatnya kemajuan teknologi informasi membuka kesempatan baru bagi perpustakaan untuk mengembangkan koleksi dari format konvensional ke format digital, mengembangkan layanan *onsite* ke layanan *online*, atau secara kompleksitas pengelolaan perpustakaan dari perpustakaan konvensional ke perpustakaan digital. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 14 ayat 3 bahwa setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi menjadi pendorong percepatan distribusi dan akses informasi di masyarakat. Selayaknya perpustakaan dalam menjangkau pemustaka untuk memanfaatkan layanan melakukan konvergensi dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan perangkat bergerak (*mobile device*) diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Gartner, Inc menyatakan "*computing everywhere*" telah menjadi *top trend* pada tahun 2015. Perlu perhatian khusus pada pengembangan perpustakaan digital (*e-library*) lingkup nasional dengan mengembangkan Gerakan *Open Access* dan Interoperabilitas antarlembaga penyedia informasi dan publikasi seperti perpustakaan, kearsipan, museum, lembaga pendidikan, usaha penerbitan dan rekaman, media massa, lembaga penelitian, lembaga pemerintah dan swasta. Masih rendahnya literasi informasi di Indonesia. Gerakan *Open Access* dan Interoperabilitas antarpenyedia informasi dan publikasi ini penting terkait dengan argumentasi berikut.

1. Adanya interoperabilitas, maka akses terhadap bahan pustaka akan tersedia seluas-luasnya.
2. Kekayaan budaya Indonesia, semakin lambat akan semakin terkikis. Interoperabilitas melalui *e-Library* dapat turut melestarikan khazanah budaya Indonesia.

3. Konten pendidikan yang belum diproduksi secara optimal. Berbagai konten yang diperoleh melalui interoperabilitas antarlembaga dapat memperkaya konten pendidikan.
4. Rendahnya akses informasi di era informasi seperti sekarang ini mengenai suatu daerah dapat menyebabkan semakin terisolasinya daerah tersebut. Melalui ekosistem repositori digital koleksi nasional, daerah dapat menyebarluaskan informasi mengenai potensi daerah tersebut.

1.4 Potensi dan Permasalahan

Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 1.922.570 km²; luas wilayah perairan 3.257.483 km², termasuk negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.504 pulau. Memiliki jumlah penduduk sekitar 255.6 juta jiwa yang tersebar di 34 provinsi; 416 kabupaten 98 kota; 7.024 kecamatan; 81.626 desa. Kondisi ini menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan perpustakaan harus komprehensif berbasis kewilayahan, sehingga tercipta rasa keadilan dan pemerataan pertumbuhan di berbagai sektor. Distribusi pembangunan perpustakaan yang tidak merata, dikhawatirkan dapat berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing masyarakat Indonesia.

Angka ketimpangan akses masyarakat terhadap berbagai sektor pembangunan masih tinggi, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap perpustakaan. Ketidakmerataan pencapaian pembangunan tersebut akibat dari faktor geografis, sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Sebagai contoh, angka ketimpangan dalam akses perpustakaan adalah ketidakmerataan jumlah perpustakaan di Indonesia, sehingga aksesibilitas perpustakaan di beberapa wilayah di Indonesia sulit dijangkau masyarakat. Dalam contoh lain adalah akses sumber informasi melalui internet, berdasarkan data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016, pengguna internet tahun 2016 132,7 atau 51,8. Penduduk pengguna internet didominasi di pulau Jawa yang mencapai 86,3 juta orang (65%), diikuti oleh Sumatera 15,7%, Sulawesi 6,3%, Kalimantan 5,8%, Bali dan Nusa Tenggara 4,7%, dan Maluku dan Papua 2,5%. Berdasarkan data secara umum masyarakat Indonesia yang terkoneksi dengan internet sebanyak 132 juta jiwa dan yang tidak terkoneksi internet sekitar 123 juta jiwa.

Permasalahan umum akses informasi dengan menggunakan sambungan internet, berkorelasi dengan dimensi perpustakaan dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Pertama, tidak meratanya pembangunan perpustakaan di Indonesia, berdasarkan data sebaran perpustakaan, tampak bahwa jumlah perpustakaan di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa, yakni sebesar 74.183 (45%); Sumatera sebesar 36.482 (24%); Sulawesi sebesar 16.920 (11%); Kalimantan sebesar 12.091 (8%); Bali dan Nusa Tenggara sebesar 10.112 (6%); Papua sebesar 3.216 (2%); Maluku sebesar 1.355 (1%). Dari jumlah perpustakaan sebanyak 154.359 perpustakaan yang tersebar di 34 provinsi baru 0,3% terakreditasi atau sesuai dengan standarisasi nasional artinya, 99,7% keberadaan perpustakaan belum terakreditasi.

Kedua, budaya baca masyarakat Indonesia masih dalam kategori tingkat rendah. Sesuai dengan hasil Kajian Budaya Baca Masyarakat Indonesia oleh Perpustakaan Nasional tahun 2015, menyimpulkan bahwa tingkat budaya baca Indonesia secara nasional kategori rendah dengan rata-rata 25,1. Hal ini berkaitan erat dengan jumlah koleksi di Indonesia menurut standar IFLA/UNESCO terjadi kekurangan koleksi sebesar 434,826,292 koleksi pada perpustakaan umum di seluruh Indonesia. Rasio ketercukupan koleksi menurut standar IFLA/UNESCO pada perpustakaan umum masih jauh dari yang diharapkan, yaitu hanya sebesar 18% dari koleksi yang ideal sesuai dengan jumlah penduduk, atau pengguna potensial perpustakaan saat ini. Kekurangan koleksi pada perpustakaan umum, berdampak pada tingkat literasi informasi pada masyarakat secara umum.

Ketiga, kemampuan literasi masyarakat Indonesia rendah berdasarkan pemeringkatan literasi internasional oleh *Most Literate Nations in the World*, yang diterbitkan *Central Connecticut State University* tahun 2016, menjelaskan bahwa tingkat kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia sangat ketinggalan. Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan tenaga perpustakaan masih sangat kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sampai tahun 2016 jumlah tenaga perpustakaan di Indonesia hanya 3.058 orang. Dari jumlah tenaga perpustakaan tersebut, hanya 5.33% orang yang dinyatakan lulus uji kompetensi, dan hanya 16.29% yang tersertifikasi. Peningkatan ketersediaan dan keandalan tenaga

perpustakaan di Indonesia untuk meningkatkan literasi informasi, memerlukan usaha yang lebih optimal.

Keempat, belum optimalnya pemanfaatan layanan perpustakaan. Sampai dengan tahun 2015 pemustaka di Indonesia sebanyak 105.098.493 jiwa/tahun. Angka ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka hanya sekitar 41% penduduk Indonesia yang mengunjungi perpustakaan. Saat ini telah terjadi perubahan gaya hidup masyarakat akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga peningkatan penggunaan *mobile devices* membuat perubahan pada pola penyebaran dan akses informasi. Untuk itu, perlu konvergensi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dimungkinkan dengan mengembangkan Gerakan *Open Access*, interoperabilitas antarpenyedia informasi, arsip dan dokumentasi, serta pengembangan *e-mobile library*. Pengembangan potensi perpustakaan digital menjadi amat penting dan strategis dalam menjawab permasalahan di atas. Perpustakaan perlu hadir sebagai wujud intervensi pemerintah agar tumbuh dan berkembang budaya membaca di masyarakat sebagai bagian pembelajaran seumur hidup (*long life learning*).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL

Visi dan misi serta tujuan Perpustakaan mengacu pada Visi dan Misi Kabinet Kerja Tahun 2015-2019, yakni **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**" serta sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan istilah Nawa Cita.

2.1 Visi, Misi, dan Nilai Organisasi

Mengacu pada Visi dan Misi Kabinet Kerja tahun 2015-2019, serta sembilan agenda prioritas atau Nawa Cita, maka visi dan misi Perpustakaan dapat dirumuskan sebagai berikut.

2.1.1 Visi

"Terwujudnya Indonesia Cerdas melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan"

2.1.2 Misi

Dalam upaya pencapaian visi Perpustakaan di atas, maka misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya layanan prima, terwujudnya perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa, terwujudnya perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan".

2.2 Nilai-Nilai:

Sebagai landasan berfikir, bersikap, bertindak, dan pengambilan keputusan dalam upaya pencapaian visi dan misi yang ditetapkan, Perpustakaan menganut nilai-nilai **"profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, dan integritas (PASTI)"**

- a. *Profesional*; bekerja maksimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas, menjunjung tinggi kode etik profesi, terus mengembangkan potensi diri, mampu mengambil keputusan yang tepat secara mandiri maupun dalam tim.
- b. *Akuntabilitas*; pemanfaatan sumber daya perpustakaan yang dapat dipertanggung-jawabkan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Sinergi*; komitmen membangun perpustakaan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

- d. *Transparan*; bersikap terbuka terhadap kinerja yang dihasilkan.
- e. *Integritas*; berkarya dan berbakti untuk organisasi dengan jujur, disiplin, penuh tanggung jawab dan dedikasi, menjunjung tinggi etika dan norma sosial, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, mengedepankan kepentingan publik dan organisasi di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, dan menjunjung tinggi amanah.

No.	Sasaran Strategis(<i>Strategic Objectives</i>)	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Layanan Prima Perpustakaan	1.1 Nilai tingkat kepuasan pemustaka
2.	Terwujudnya Perpustakaan Sebagai Pelestari Khazanah Budaya Bangsa	2.1 Persentase peningkatan serah-simpan KCKR menjadi koleksi nasional
		2.2 Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno
3.	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	3.1 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan

2.3. Tujuan Perpunas

Tujuan utama Perpunas dapat dilihat dalam matriks berikut,

Tujuan Utama(<i>Ultimate Goal</i>)	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya Indonesia Cerdas melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

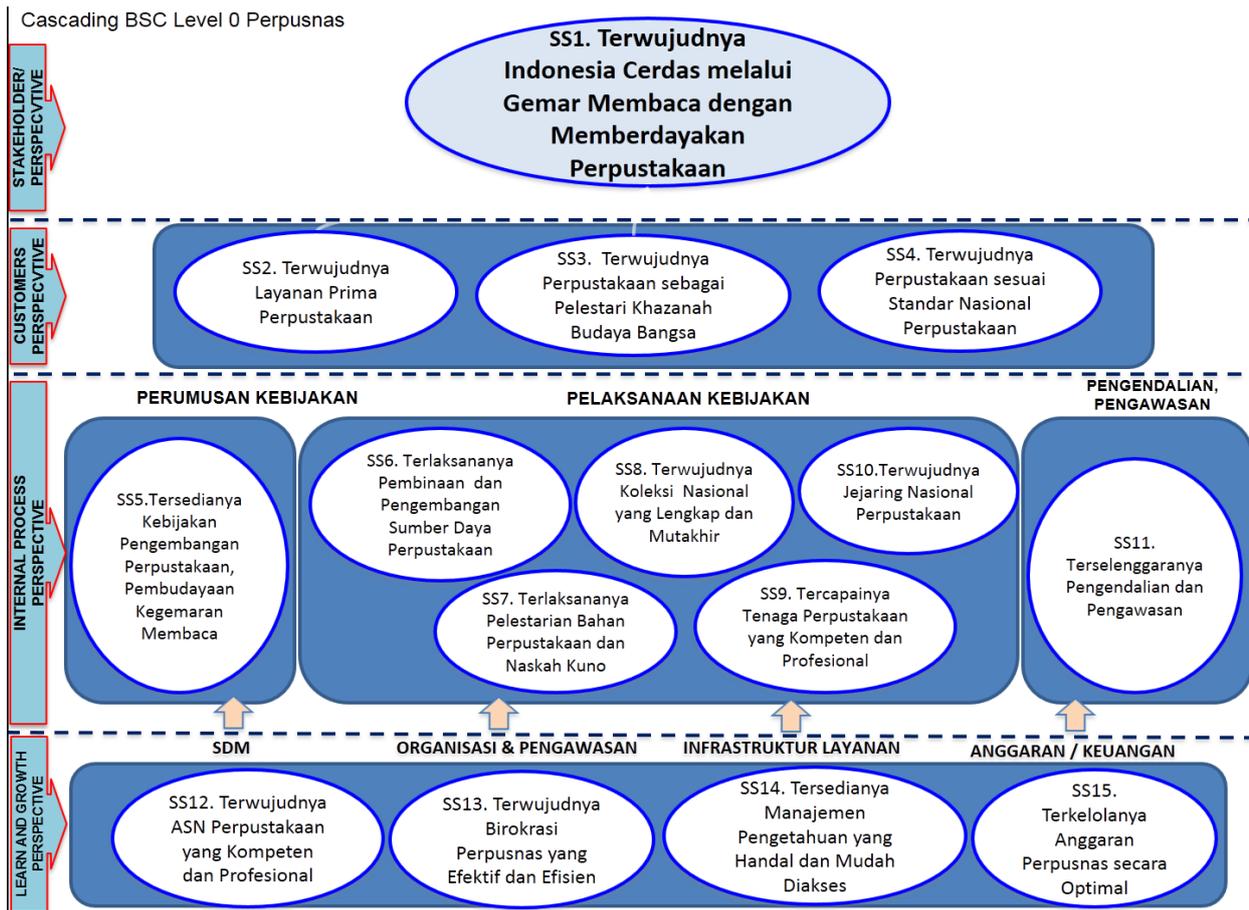
2.4. Sasaran Strategis

Rencana Strategis Perpunas secara jelas dapat dilihat dalam matriks berikut:

No.	Sasaran Strategis(<i>Strategic Objectives</i>)	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Layanan Prima Perpustakaan	1.1 Nilai tingkat kepuasan pemustaka
2.	Terwujudnya Perpustakaan Sebagai Pelestari Khazanah Budaya Bangsa	2.1 Persentase peningkatan serah-simpan KCKR menjadi koleksi nasional
		2.2 Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno
3.	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	3.1 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan

2.5. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategis pencapaian tujuan utama dan sasaran strategis Perpustakaan periode 2015-2019 digambarkan dalam peta strategi, sebagai berikut:



Gambar 3. Peta Strategi Perpustakaan (Level 0 - Lembaga)

1. Stakeholders Perspective

Sasaran Strategis pertama (SS1) yang akan dicapai Perpustakaan adalah: “Terwujudnya Indonesia Cerdas melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan”, dengan Indikator Kinerja:

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (skala Nilai 0-100) dari nilai 25,1 pada tahun 2015 menjadi 50 pada tahun 2019.

2. Customer Perspective

Menjabarkan misi “Layanan Prima” maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai Perpustakaan adalah: “Terwujudnya Layanan Prima Perpustakaan” dengan Indikator Kinerja:

Nilai tingkat kepuasan pemustaka (skala nilai 1-5) dari nilai 2 pada tahun 2015 menjadi 4 pada tahun 2019.

Penjabaran misi “Pelestari khasanah budaya bangsa” maka sasaran strategis keempat (SS-4) “Terwujudnya perpustakaan sebagai pelestari khasanah budaya bangsa” dengan indikator kinerja adalah:

Persentase peningkatan serah-simpan KCKR menjadi koleksi nasional tahun 2015 sebesar 10% pada tahun 2015 dan menjadi 80% pada tahun 2019.

Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno dari tahun 2015 sebesar 15,11%, naik 16,48% pada tahun 2019.

Penjabaran dari misi “Perpustakaan sesuai standar nasional” maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai Perpustnas adalah “Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan” dengan Indikator Kinerja:

Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dari tahun 2015 sebesar 0,11%, menjadi 1% pada tahun 2019.

3. *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh Perpustakaan Nasional yaitu:

a. Sasaran Strategis kelima (SS-5) adalah “Tersedianya Kebijakan Pengembangan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca” dengan Indikator Kinerja Tingkat efektifitas peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan dari kurang efektif tahun 2015 sebesar 50% menjadi sangat efektif pada tahun 2019 sebesar 80%.

Tabel 24. Skala Nilai Capaian

RASIO TINGKAT CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN
≤ 40	Sangat tidak efektif
41 – 59.99	Tidak efektif
60 – 79.99	Efektif
≥ 80	Sangat efektif

b. Sasaran Strategis keenam (SS-6) adalah “Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan” dengan Indikator Kinerja persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan dari tahun 2015 sebesar 0.62%, menjadi 1.3% pada tahun 2019.

c. Sasaran Strategis ketujuh (SS-7) adalah “Terlaksananya Pelestarian Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno” dengan Indikator Kinerja

- Persentase peningkatan alih-bahasa dan alih-aksara naskah kuno dari tahun 2015 sebesar 9,55%, menjadi 10,23% pada tahun 2019.
 - Persentase pelestarian fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno dari 16,5% tahun 2015 menjadi 18% pada tahun 2019.
- d. Sasaran Strategis kedelapan (SS-8) adalah “Terwujudnya Koleksi Nasional yang Lengkap dan Mutakhir” dengan Indikator Kinerja Persentase penambahan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir dari 10% tahun 2015 menjadi 30% pada tahun 2019.
- e. Sasaran Strategis kesembilan (SS-9) adalah “Tercapainya Tenaga Perpustakaan yang Kompeten dan Profesional” dengan Indikator Kinerja:
- Persentase ketersediaan tenaga perpustakaan (Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan) menjadi 2,7 % dari 356.049 kebutuhan tenaga perpustakaan menjadi 3,6% pada tahun 2019.
 - Persentase peningkatan pustakawan tersertifikasi dari 3,5% pada tahun 2015 menjadi 20,4 % pada tahun 2019.
- f. Sasaran Strategis kesepuluh (SS-10) adalah “Terwujudnya Jejaring Nasional Perpustakaan” dengan Indikator Kinerja persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan dari 0,23 % pada tahun 2015 menjadi 1.1% pada tahun 2019.
- g. Sasaran Strategis kesebelas (SS-11) adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan” dengan Indikator Kinerja
- Persentase tingkat kepatuhan unit kerja terhadap Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 100% pada tahun 2015 sampai tahun 2019.
 - Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebesar 100% pada tahun 2015 sampai tahun 2019.
 - Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sebesar 100% pada tahun 2015 sampai tahun 2019.
4. *Learning and Growth Perspective*

Untuk mencapai sasaran strategis seperti tersebut, dibutuhkan *input* yang dapat mendukung pelaksanaan proses sehingga menghasilkan

output atau *outcome* Perpustakaan. Terdapat empat sasaran strategis yang akan dicapai adalah:

- a. Sasaran Strategis keduabelas (SS-12) adalah “Tersedianya ASN Perpustakaan yang Kompeten dan Profesional dengan Indikator Kinerja Indeks kompetensi dan integritas ASN Perpustakaan dari nilai indeks 86,2 pada tahun 2015 menjadi 87,1 di tahun 2019.
- b. Sasaran Strategis ketigabelas (SS-13) adalah “Terwujudnya Birokrasi Perpustakaan yang Efektif dan Efisien dengan Indikator Kinerja
 - Nilai penerapan RB Perpustakaan dari nilai 57 tahun 2015 menjadi 75 di tahun 2019.
 - Persepsi Inisiatif anti korupsi Perpustakaan (skala nilai) dari 3,2 tahun 2015 menjadi 3,6 tahun 2019.
- c. Sasaran Strategis keempatbelas (SS-14) adalah “Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses dengan Indikator Kinerja Persepsi unit kerja terhadap kemudahan akses informasi dari 3 tahun 2015, menjadi 4 pada tahun 2019.
- d. Sasaran Strategis kelima belas (SS-15) adalah “Terkelolanya Anggaran Perpustakaan secara Optimal dengan Indikator Kinerja;
 - Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpustakaan dari tahun 2015 hingga 2019 tetap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 - Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Perpustakaan dari 60 pada tahun 2015 menjadi 80 pada tahun 2019.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Pembangunan perpustakaan agar lebih terarah dan terukur serta adanya kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan, maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan perpustakaan yang merupakan tuntutan pelaksanaan pembangunan bidang perpustakaan dalam kurun waktu jangka menengah, sebagai berikut.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perpustakaan

Arah kebijakan dan strategi pengembangan perpustakaan dapat direalisasikan dengan melaksanakan inisiatif strategis sesuai dengan misi lembaga yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

3.1.1 Mewujudkan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan, melalui:

- a. Meningkatkan jumlah ketersediaan dan pemerataan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia

Langkah operasional yang dilakukan adalah: (1) fasilitasi pendirian berbagai jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar); (2) stimulan untuk pembangunan dan penguatan berbagai jenis perpustakaan di seluruh wilayah; (3) insentif pengembangan perpustakaan bergerak menggunakan berbagai moda transportasi sesuai dengan karakter kewilayahan.

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: (1) menyempurnakan Standar Nasional Perpustakaan; (2) penyusunan panduan implementasi standar nasional perpustakaan; (3) pembinaan dan pengembangan perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan pendidikan tinggi dan perpustakaan khusus; (4) pengembangan sistem informasi manajemen perpustakaan; (5) pengembangan fasilitas layanan Perpustakaan Nasional; (6) implementasi standar kinerja

perpustakaan sesuai dengan *International Organization for Standardization*; (7) fasilitasi dan penguatan lembaga akreditasi perpustakaan di pusat dan daerah.

3.1.2 Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan, melalui:

- a. Meningkatkan jumlah dan sebaran tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: (1) Kerja sama dengan lembaga terkait (Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenristekdikti) untuk peningkatan jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan sesuai dengan kebutuhan; (2) penyusunan dan pengembangan kurikulum dan bahan ajar; (3) akreditasi program penyelenggaraan diklat; (4) pengembangan sarana pendidikan dan pelatihan; (5) pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan; (6) Implementasi sistem pembelajaran jarak jauh tenaga perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; (7) Peningkatan kompetensi tenaga pengajar Diklat Kepustakawanan.

- b. Meningkatkan jumlah pustakawan tersertifikasi

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: (1) penyusunan pedoman dan standar kompetensi pustakawan; (2) pengembangan kompetensi dan pemberian sertifikasi pustakawan serta tim penilai; (3) pengembangan dan pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan; (4) koordinasi pengembangan jabatan fungsional pustakawan; (5) penguatan sistem kepustakawanan melalui hibah pengkajian; (6) pemilihan pustakawan berprestasi; (7) pengembangan sistem data kepustakawanan Indonesia; (8) Fasilitasi dan penguatan tenaga asesor dan lembaga akreditasi pustakawan di tingkat pusat dan daerah.

3.1.3 Mewujudkan Koleksi Nasional Perpustakaan yang lengkap dan merata untuk memenuhi kebutuhan pemustaka di seluruh wilayah Indonesia, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Meningkatkan Serah-Simpan KCKR menjadi koleksi nasional

Langkah operasional yang dilakukan adalah: (1) menghimpun koleksi KCKR untuk deposit bahan perpustakaan; (2) meningkatkan intensitas promosi manfaat pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam bagi penulis, penerbit, perusahaan rekaman dan media massa; (3) meningkatkan aksesibilitas sistem dan promosi pemanfaatan *International Standard Book Number (ISBN)*, Katalog Dalam Terbitan (KDT) dan *International Standard Music Number (ISMN)* bagi penulis, penggubah, penerbit, perusahaan rekaman; (4) Menghimpun dokumentasi hasil program siaran televisi dan radio di Indonesia; (5) menghimpun literatur kelabu dari berbagai macam seminar konferensi, diskusi di Indonesia dalam berbagai bidang keilmuan; (6) Menghimpun koleksi *ephemeral* dari berbagai macam aktivitas publik; (7) Menghimpun karya-karya terbitan dan rekaman pertama untuk kepentingan historis; (8) pemberian penghargaan kepada penerbit, perusahaan rekaman dan penulis yang aktif dalam pelaksanaan Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; (9) Mengembangkan koleksi Indonesiana yang lengkap.
- b. Peningkatan rasio ketersediaan koleksi dengan jumlah pemustaka Langkah operasional yang dilakukan adalah : (1) pengadaan koleksi bahan perpustakaan dalam format konvensional dan digital; (2) peningkatan sebaran ketersediaan koleksi di berbagai jenis perpustakaan di daerah; (3) penyediaan insentif untuk penerjemahan karya-karya asing yang penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia; (4) Insentif untuk penerbitan karya-karya penting karya penulis Indonesia untuk pengembangan IPTEK dan budaya Indonesia; (5) Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap bahan perpustakaan melalui perpustakaan digital dan perpustakaan mobil berbasis TIK; (6) mengembangkan koleksi bahan perpustakaan berbasis inklusi sosial; (7) membangun konten berbasis *crowdsourcing* untuk *repository* kultural berbasis inklusi sosial (arsip lembaga/pribadi, *social media*, *oral history*, *local history*); (8) meningkatkan pengadaan buku digital; (9) meningkatkan bantuan bahan perpustakaan baik konvensional maupun digital siap layan ke semua jenis perpustakaan khususnya di wilayah timur Indonesia;
- c. Meningkatkan rasio penambahan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir

Langkah operasional yang dilakukan adalah : (1) meningkatkan pengadaan berbagai jenis bahan perpustakaan; (2) meningkatkan pengolahan dan pengorganisasian koleksi; (3) menyusun pedoman pengolahan bahan perpustakaan; (4) pengelolaan *e-resources* (*e-book*, *e-journal*) yang dapat diakses melalui situs *web* dengan alamat *www.perpusnas.go.id*. (5) memberikan insentif ke penerbit untuk memupuk industri penerbitan dan usaha rekaman di Indonesia. (6) memberikan insentif untuk usaha penyaduran dan penerbitan karya-karya asing yang penting untuk pengembangan IPTEK di Indonesia.

- d. Meningkatkan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno memiliki nilai intelektual dan signifikansi ke-Indonesiaan
- Langkah operasional yang dilakukan adalah: (1) mengalihmediakan bahan perpustakaan dan naskah kuno ke dalam bentuk mikro, reproduksi dan digital; (2) pelestarian fisik (konservasi) bahan perpustakaan; (3) implementasi kurasi digital untuk kepentingan preservasi digital untuk kepentingan jangka panjang; (4). Meningkatkan interoperabilitas antara lembaga perpustakaan, kearsipan, museum, *science and techno park*, dan lembaga penelitian untuk membangun repositori pengetahuan Indonesia.
- e. Meningkatkan alih-bahasa, alih-aksara, alih-media, penelitian dan publikasi naskah kuno nusantara
- Langkah operasional yang dilakukan adalah: (1) mengidentifikasi dan registrasi naskah kuno nusantara di dalam dan luar negeri (Nomor Registrasi Naskah); (2) meningkatkan penghimpunan dan pelestarian naskah kuno nusantara sebagai repositori warisan dokumenter bangsa; (3) melaksanakan penelitian, seminar dan publikasi naskah kuno nusantara; (4) Meningkatkan kegiatan alih-bahasa, alih aksara dan alih-media naskah kuno nusantara; (5) meningkatkan kerja sama dalam dan luar negeri untuk digitalisasi, penelitian, dan publikasi naskah kuno nusantara; (6) memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok dan lembaga yang aktif melestarikan, mengkaji naskah kuno nusantara; (7) mengembangkan eksplorasi naskah nusantara berbasis inklusi sosial.

3.1.4 Meningkatkan pemanfaatan Perpustakaan dan Pemerataan Akses Layanan Perpustakaan, dilaksanakan dengan strategi:

a. Meningkatkan tingkat kepuasan pemustaka

Langkah operasional yang dilakukan adalah: (1) peningkatan kualitas layanan; (2) promosi layanan perpustakaan; (3) kajian layanan perpustakaan; (4) kemas ulang dalam format multimedia; (5) kerja sama layanan perpustakaan lingkup nasional dan internasional; (6) pengembangan layanan pemustaka berkebutuhan khusus (*disabilitas*). (7) konvergensi layanan konvensional dan digital; (8) pemberian penghargaan kepada perseorangan, kelompok dan lembaga yang aktif membudayakan kegemaran membaca; (9) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial; (10) mengembangkan layanan pesan antar untuk pemustaka yang tidak dapat meninggalkan rumah, rumah jompo, rumah sakit karena sakit atau tua; (11) membangun layanan referral berbasis sistem informasi rujukan (memadukan *clearing house* dan *call center*);

b. Meningkatkan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan

Langkah operasional yang dilakukan adalah: (1) pengembangan jejaring nasional perpustakaan melalui *Indonesia Onesearch*; (2) pengembangan layanan perpustakaan digital (*e-library*) dan layanan berbasis media sosial (*iPusnas*); (3) meningkatkan kerja sama antarkelembagaan dalam dan luar negeri bidang perpustakaan; (4) meningkatkan pengumpulan dan akses pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN), bibliografi nasional Indonesia (BNI), arsip *web* nasional dan repositori pengetahuan Indonesia; (5) membangun layanan bibliografi nasional (layanan kopi katalog, tajuk otoritas lingkup nasional); (6) mengembangkan layanan perpustakaan terpadu berbasis konsorsium;

c. Meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah : (1) meningkatkan layanan perpustakaan dan promosi koleksi tentang Bung Karno; (2) meningkatkan pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan tentang Bung Karno; (3)

melakukan kajian dan publikasi tentang pemikiran, gagasan dan peninggalan tentang Bung Karno; (4) meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan ide, gagasan dan peninggalan tentang Bung Karno.

- d. Meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
- Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: (1) meningkatkan layanan perpustakaan dan promosi koleksi tentang Bung Hatta; (2) meningkatkan pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan tentang Bung Hatta; (3) melakukan kajian dan publikasi tentang pemikiran, gagasan dan peninggalan tentang Bung Hatta; (4) meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan ide, gagasan dan peninggalan tentang Bung Hatta.

3.2 Kerangka Regulasi

Tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan Nasional RI dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan, jika didukung oleh regulasi yang kuat. Kerangka regulasi yang telah disusun pada tahun 2010-2014 antara lain adalah Peraturan Kepala sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu tentang: 1) Standar Tenaga Perpustakaan; dan 2) Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan; serta Peraturan Kepala tentang: 1) Pembudayaan Gemar Membaca; 2) Grand Desain Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional; dan 3) Pembangunan perpustakaan model sebagaimana tercantum dalam tabel anak lampiran.

Kerangka regulasi yang akan disusun pada tahun 2015-2019 antara lain adalah Amandemen Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya cetak dan Karya Rekam, Peraturan Pemerintah yang bisa mengakomodir karya cetak dan karya rekam dalam bentuk digital, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang:

1. Standar pengelolaan objek digital bahan perpustakaan
2. Grand desain pengembangan perpustakaan lingkup nasional
3. Grand desain pengembangan koleksi bahan perpustakaan lingkup nasional

4. Grand desain pengembangan tenaga perpustakaan lingkup nasional
5. Grand desain layanan perpustakaan lingkup nasional
6. Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan pembangunan di bidang perpustakaan memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Prioritas kegiatan penguatan kelembagaan tahun 2015-2019 antara lain melalui:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan perpustakaan.
2. Pembentukan Dewan Perpustakaan.
3. Pembinaan organisasi profesi pustakawan.
4. Penguatan lembaga akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan.
5. Penyelarasan struktur organisasi dan tata kelola Perpustakaan Nasional.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Perpustnas merupakan kondisi yang akan dicapai dan diharapkan membawa pengaruh atau dampak (*outcome/impact*) baik bagi budaya baca di masyarakat. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perpustnas adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN TARGET	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1 Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan	1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Skala Nilai	25,1	26,5	34,0	43,0	50,0

2. Customers Perspective

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN TARGET	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
2 Terwujudnya Layanan Prima Perpustakaan	2 Nilai tingkat kepuasan pemustaka	Skala Nilai	2,0	3,0	3,5	3,7	4,0
3 Terwujudnya Perpustakaan sebagai Pelestari Khazanah Budaya Bangsa	3 Persentase peningkatan Serah-Simpan KCKR menjadi koleksi nasional	Persentase	10	24	40	60	80
	4 Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno	Persentase	15,11	15,31	15,44	15,63	16,48
4 Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	5 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase	0,11	0,30	0,49	0,52	1,00

3. Perspektif Proses Internal

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN TARGET	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN TARGET	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
5	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca	6	Tingkat efektifitas peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan	Skala Nilai	50	60	65	70	80
6	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	7	Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	Persentase	0.62	1.27	1.0	1.30	1.30
7	Terlaksananya Pelestarian Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno	8	Persentase peningkatan alih bahasa dan alih aksara naskah kuno	Persentase	9,55	9,78	9,84	9,99	10,23
		9	Persentase pelestarian fisik dan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno	Persentase	16,5	16,7	16,8	17,0	18,0
8	Terwujudnya Koleksi Nasional yang Lengkap dan Mutakhir	10	Persentase penambahan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir	Persentase	10	15	20	25	30
9	Tercapainya Tenaga Perpustakaan yang Kompeten dan Profesional	11	Persentase ketersediaan tenaga perpustakaan (Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan)	Persentase	2,74	2,89	3,04	3,32	3,63
		12	Persentase peningkatan pustakawan tersertifikasi	Persentase	3,5	7,2	11,3	15,7	20,4
10	Terwujudnya Jejaring Nasional Perpustakaan	13	Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	Persentase	0,23	0,33	0,50	0,70	1,1
11	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan	14	Persentase tingkat kepatuhan unit kerja terhadap PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase	100	100	100	100	100
11		14	Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Persentase	100	100	100	100	100
		15	Persentase kepatuhan pelaksanaan UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Persentase	100	100	100	100	100

4. Learning and Growth Perspektif

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN TARGET	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
12	Terwujudnya Aparat Sipil Negara Perpustakaan yang Kompeten dan Profesional	16	Indeks kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara Perpusnas	Indeks	86,2	86,2	86,7	86,9	87,1
13	Terwujudnya Birokrasi Perpusnas yang Efektif dan Efisien	17	Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Perpusnas	Nilai	57	62	65	70	75
		18	Persepsi Inisiatif anti korupsi Perpusnas	Skala (1-10)	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
14	Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal dan Mudah Diakses	19	Persepsi unit kerja terhadap kemudahan akses informasi	Skala (1-5)	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
15	Terkelolanya Anggaran Perpusnas secara Optimal	20	Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpusnas	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		21	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Perpusnas	Nilai	60	65	70	75	80

b. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan capaian hasil (*outcome*) program. Indikator Kinerja Program di Perpustakaan telah ditetapkan untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Perpustakaan Nasional telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Eselon I b, sebagaimana Anak Lampiran 1.

c. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluar (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Perpustakaan Nasional telah ditetapkan ke dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Eselon II, sebagaimana Anak Lampiran 1.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam memenuhi target kinerja Perpustakaan sesuai arah, kebijakan, strategis dan program pengembangan perpustakaan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pengembangan perpustakaan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD). Pendanaan Perpustakaan akan memanfaatkan sebesar-besarnya alokasi anggaran yang bersumber dari APBN untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia dan untuk membangun budaya membaca masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Anak Lampiran 1.

BAB V PENUTUP

Renstra Perpustakan Tahun 2015-2019 edisi perubahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun, sesuai dengan masukan para pemangku kepentingan. Renstra ini disusun kembali dalam rangka penguatan akuntabilitas Perpustakan, sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah Tahun 2015.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan perwujudan visi Pemerintah tahun 2015-2019, melalui agenda 9 (sembilan) prioritas Nawa Cita yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, sektor perpustakaan memiliki peran berikut: (1) Membangun dari daerah dan desa; (2) Meningkatkan produktivitas rakyat; (3) Menjaga kualitas hidup rakyat; (4) Revolusi karakter bangsa; dan (5) Memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika.

Program perpustakaan sangat erat hubungannya dengan aspek-aspek berikut; (1) menjamin ketersediaan jumlah berbagai jenis perpustakaan secara cukup, dan ketersebaran perpustakaan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; (2) Memberikan jasa dan informasi ke seluruh wilayah dalam upaya menjamin ketersediaan dan pemerataan koleksi bahan perpustakaan di semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia; (3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan tenaga perpustakaan, baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan dan seluruh wilayah Indonesia; (4) Mempromosikan penggunaan perpustakaan dan meningkatkan akses layanan perpustakaan di seluruh lapisan masyarakat di semua wilayah Indonesia. Langkah strategis dalam rangka mencapai sasaran:

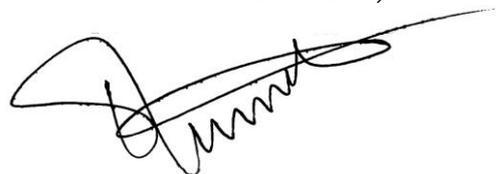
1. Mewujudkan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan
 - a. Meningkatkan jumlah ketersediaan dan pemerataan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
2. Mewujudkan Koleksi Nasional Perpustakaan yang lengkap dan merata untuk memenuhi kebutuhan pemustaka di seluruh wilayah Indonesia
 - a. Meningkatkan Serah-Simpan KCKR menjadi koleksi nasional;
 - b. Peningkatan rasio ketersediaan koleksi dengan jumlah pemustaka;
 - c. Meningkatkan rasio penambahan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir;

- d. Meningkatkan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno memiliki nilai intelektual dan signifikansi ke-Indonesiaan;
 - e. Meningkatkan alih-bahasa, alih-aksara, alih-media, penelitian dan publikasi naskah kuno nusantara.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan
 - a. Meningkatkan jumlah dan sebaran tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi;
 - b. Meningkatkan jumlah pustakawan tersertifikasi.
 4. Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan dan keterjangkauan akses layanan perpustakaan
 - a. Meningkatkan tingkat kepuasan pemustaka;
 - b. Meningkatkan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan;
 - c. Meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno ;
 - d. Meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.

Renstra lembaga ini menjadi dasar untuk penyusunan unit kerja eselon I yang merupakan penjabaran sasaran strategis dan target kinerja lembaga dan renstra unit kerja eselon II dan UPT yang merupakan penjabaran sasaran strategis unit kerja eselon I sesuai dengan substansinya. Target kinerja lembaga, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II dan UPT dievaluasi secara periodik dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan Renstra Perpustnas ini maka akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan kelembagaan dan pembangunan nasional.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO